



**BADAN POM**

# **LAKIN INTERIM**

## **TRIWULAN I TAHUN 2023**



**Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Interim Triwulan I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan yang terbaru Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM.

Dengan penuh kebanggaan dan antusiasme, Saya mempersembahkan Laporan kinerja Interim Balai Besar POM di Banda Aceh untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai perwujudan tanggung jawab dan akuntabilitas pengelolaan kinerja dan anggaran Triwulan I tahun 2023. Misi kami adalah untuk mendukung Visi Badan POM RI mewujudkan Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dengan merampungkan berbagai program dan kegiatan untuk memberikan kinerja terbaik yang terhimpun dalam pencapaian kinerja 11 (sebelas) sasaran strategis (SS).

Pada Triwulan 1 (satu) hanya 6 ( Enam ) SS yang dapat dievaluasi sedangkan 5 (Lima) SS lainnya terdapat beberapa IKU yang tidak dievaluasi di Triwulan satu (penilaian satu tahun).

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Inspektorat Utama Badan POM yang telah melakukan bimbingan dan asesmen secara berkelanjutan dengan rekomendasi yang semuanya telah ditindaklanjuti oleh Balai Besar POM di Banda Aceh. Saya juga memberikan apresiasi yang tinggi bagi seluruh pegawai di lingkungan Balai Besar POM di Banda Aceh dan semua pihak yang telah berkontribusi mengelola 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama untuk mencapai Sasaran Strategis yang memenuhi ekspektasi, walaupun tentunya masih ada beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti untuk perbaikan berkelanjutan. Kami menyatakan bahwa informasi Pencapaian Kinerja telah lengkap dan dapat diandalkan untuk evaluasi bagi pimpinan dan pihak yang berkepentingan. Kami berharap untuk dapat terus menjalankan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah lingkup kerja Balai Besar POM di Banda Aceh dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mencapai Sasaran Strategis organisasi yang memenuhi ekspektasi sesuai Rencana Strategis Badan POM.

Banda Aceh, 18 April 2023  
Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh



Yudi Noviandi, M.Sc, Tech, Apt

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja interim tahun 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM di Banda Aceh) telah disusun dan merupakan perwujudan akuntabilitas BBBPOM di Banda Aceh dalam memberikan uraian dan penjelasan pelaksanaan tugas dan fungsi yang berisi informasi dan penjelasan yang memadai atas capaian Sasaran Strategis yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di tahun 2023. Kepala BBPOM di Banda Aceh pada tanggal 22 Desember 2022 telah menandatangani Perjanjian Kinerja yang memuat 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mencapai 11 (sebelas) Sasaran Strategis pada tiga level perspektive sesuai Renstra 2020-2024.

### **Stakeholders Perspective**

1. Mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dengan NPS sebesar 92,86% belum memenuhi ekspektasi;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan tidak dievaluasi di Triwulan;
3. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan tidak dievaluasi di Triwulan;

### **Internal Process Perspective**

Terdapat empat Sasaran Strategis di level ini dan tiga diantaranya telah memenuhi ekspektasi, kecuali pada Sasaran Strategis 6 yang belum memenuhi ekspektasi.

4. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik dengan NPS sebesar 94.47% belum memenuhi ekspektasi;
5. Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan dengan NPS sebesar 105.5% telah memenuhi ekspektasi;
6. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan dengan NPS sebesar 115.37% telah memenuhi ekspektasi;
7. Meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan dengan NPS sebesar 30% tidak memenuhi ekspektasi.

### **Learning and Growth perspective**

Sasaran Strategis 8 hingga 10 tidak dievaluasi di Triwulan I. Sasaran Strategis sebelas memiliki

capaian 137,73% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan

8. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal tidak dievaluasi di Triwulan;
9. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkinerja optimal tidak dievaluasi di Triwulan;
10. Memperkuat laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan tidak dievaluasi di Triwulan;
11. Mengelola keuangan secara akuntabel dengan NPS sebesar 137.73% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Banda Aceh yang dievaluasi pada triwulan 1 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat (107.77 %).
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat (110.79 %).
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (87.15 %).
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (64.10%).
5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat (94.44 %).
6. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh (- %).
7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (- %).
8. Indeks kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan (- %).
9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM (- %).
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan (100 %).
11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (112.77%).
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (100%).
13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

- (86.54 %).
14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (103.97 %).
  15. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banda Aceh (- %).
  16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik (69.06 %).
  17. Tingkat fektifitas KIE Obat dan Makanan (102.01 %).
  18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (100 %).
  19. Jumlah desa pangan aman (125 %).
  20. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (266.67 %).
  21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar (150.55 %).
  22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar (115.37 %)
  23. Persentase Keberhasilan Penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan (30 %).
  24. Indeks RB BBPOM di Banda Aceh (- %).
  25. Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh (- %).
  26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh (- %).
  27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (- %).
  28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal (116.0 %).
  29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh (137.73%).

## HIGHLIGHT KINERJA

Balai Besar POM di Banda Aceh melaksanakan beberapa kegiatan selama triwulan I tahun 2023 guna mendukung perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta untuk meningkatkan hasil pengawasan obat dan makanan.

### **1. Balai Besar POM di Banda Aceh Melakukan Koordinasi dengan Dekan FKIP Universitas Samudera Langsa guna meningkatkan efektivitas kerjasama**



Pada tanggal 16 Januari 2023 bertempat di ruang dekan FKIP Universitas Samudera, Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh, Yudi Noviandi, M. Sc. Tech, Apt melakukan koordinasi dengan Dekan FIKIP Universitas Samudera, Drs. Muhammad Yaqob, M. Pd, QIA. Adapun agenda yang dibicarakan terkait rencana pelaksanaan (action plan) implementasi kerjasama selama tahun 2023.

### **2. Balai Besar POM di Banda Aceh Melaksanakan Audiensi lintas sektor Intervensi Keamanan Pangan di Kabupaten Bireun**



Pada tanggal 01 Februari 2023 Tim Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan audiensi bersama pemerintah daerah (Pemda) Kab. Bireun terkait intervensi keamanan pangan sebagai program Prioritas Nasional : Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman.

### **3. Balai Besar POM di Banda Aceh Gelar Forum Advokasi dan Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pemerintah Kabupaten Bener Meriah**

Balai Besar POM di Banda Aceh menggelar Forum Advokasi Terpadu Keamanan Pangan Prioritas Nasional Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), Pasar Pangan

Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) Tahun 2023 di Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 10 Februari 2023. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pengembangan program bersama kedepannya dan pemerintah daerah dapat menganggarkan dan mereplikasi program pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan.



#### 4. Balai Besar POM di Banda Aceh Melakukan Pelatihan ISO/IEC 17025;2017



Kegiatan ini dilakukan selama dua hari pada tanggal 13-14 Februari 2023 di aula BBPOM Banda Aceh, dengan jumlah 40 peserta pegawai dari bidang pengujian, PPNPN dan cleaning servis. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pegawai terkait manajemen mutu laboratorium dan dapat di implementasikan pada kegiatan pengujian di BBPOM Banda Aceh.

#### 5. Tingkatkan Keamanan Obat dan Makanan, BPOM Aceh lakukan orientasi kepada Calon Pamong SAKA POM di Provinsi Aceh

BPOM Aceh bersama Kwarda Pramuka Aceh melaksanakan orientasi SAKA POM di Aula BPOM Aceh pada Kamis, 02 Maret 2022 yang diikuti oleh 30 peserta calon pamong dari BPOM Aceh, Loka Aceh Tengah, Loka Aceh Selatan dan perwakilan dari Dharma Wanita BPOM Aceh. Dengan dibentuknya SAKA POM ini, diharapkan memiliki kader/tokoh yang menjadi perpanjangan tangan untuk mengawal obat dan makanan aman di Provinsi Aceh.



#### 6. Perkuat Kinerja dan Kualitas, BBPOM Banda Aceh melakukan seleksi kompetensi PPPK Badan POM TA 2022

Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan Seleksi Kompetensi PPPK Badan POM



Tahun Anggaran 2022 yang bertempat di Kantor Regional XIII BKN Aceh pada Sesi III tanggal 27 Maret 2023. Kegiatan ini diikuti 20 pelamar yang mendaftar di Badan POM, Formasi yang tersedia antara lain Pengawas Farmasi Obat dan Makanan dan Arsiparis. Sebelumnya pelamar mendaftar melalui situs resmi Badan POM dan mengikuti tahapan seleksi yang terdiri dari tes kompetensi teknis, tes kompetensi manajerial, tes kompetensi sosial kultural dan sesi wawancara .

**7. Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan intensifikasi pengawasan pangan jajanan Ramadhan 2023/1444 H di Kota Calang Aceh Jaya dan Nagan Raya**



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh bersama Pemerintah Daerah di Kota Calang Kab Aceh Jaya dan Kab. Nagan Raya beserta Lintas sektor Dinas Kesehatan Kab Aceh Jaya dan Nagan Raya kembali melakukan Pengawasan Keamanan Pangan baik pada sarana distribusi maupun Pangan Jajanan Ramadhan (takjil ) pada tanggal 04 April 2023. Total sampel yang disampling dan diuji sebanyak 50 sampel, dengan hasil pengujian seluruhnya Memenuhi Syarat. Tidak ditemukan pangan dengan kandungan bahan berbahaya maupun dilarang di Kab. Aceh Jaya dan Kab Nagan Raya.

**8. Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan intensifikasi pengawasan pangan jajanan Ramadhan 2023/1444 H di Kota Sigli**

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BPOM Aceh) kembali melakukan Pengawasan Keamanan Pangan baik pada sarana retail pangan dan pusat penjualan jajanan Ramadhan di kota Sigli Kab. Pidie pada tanggal 12 April 2023. Sampel takjil yang diuji berupa mie, bakso, tahu,



agar-agar, kue basah dan minuman yang berwarna. Total sampel yang disampling dan diuji sebanyak 40 sampel, dengan hasil pengujian seluruhnya Memenuhi Syarat. Tidak ditemukan pangan dengan kandungan bahan berbahaya.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	<b>iii</b>
<b>HIGHLIGHT KINERJA.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Gambaran Umum Organisasi .....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya.....	3
1.3 Aspek Strategis Organisasi .....	6
1.4 Analisis Lingkungan Strategis Internal.....	8
1.5 Isu Strategis.....	13
<b>BAB II</b>	<b>17</b>
<b>PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>17</b>
2.1 Rencana Strategis .....	17
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	22
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) .....	25
<b>BAB III</b>	<b>30</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>30</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	30
e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi .....	121
3.2. Realisasi Anggaran .....	137
3.3 Pemanfaatan Laporan Kinerja.....	139
Laporan Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh menerapkan evaluasi Kinerja berbasis balance score card dengan menggunakan data kinerja yang dirangkumkan di dalam Laporan Kinerja. Rekomendasi diperoleh dari Laporan Kinerja Interim dan tahunan. ....	139
<b>BAB IV</b>	<b>141</b>

**PENUTUP 141**

4.1 Kesimpulan .....	141
4.2 Saran .....	142

## DAFTAR TABEL

Table 1. Profil Pegawai berdasarkan pendidikan.....	8
<b>Table 2. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi.....</b>	<b>13</b>
Table 3. Rencana Kinerja Tahun 2022 Balai Besar POM di Banda Aceh.....	20
Table 4. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2022 .....	23
Table 5. Kriteria Pencapaian Strategis .....	28
<b>Table 6. Pencapaian Sasaran kegiatan .....</b>	<b>30</b>
<b>Table 7. Pencapaian Indikator Kinerja Utama .....</b>	<b>32</b>
<b>Table 8. Target dan Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat .....</b>	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
<b>Table 9. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2023 .....</b>	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
<b>Table 10. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.....</b>	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
<i>Table 11. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I.....</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
<b>Tabel 12. realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2023.....</b>	<b>38</b>
<i>Tabel 13. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.....</i>	<i>39</i>
<i>Tabel 14. Target dan Realisasi Persentase Obat Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan triwulan I.....</i>	<i>40</i>
<i>Tabel 15. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2023.....</i>	<i>41</i>

<b>Tabel 16. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.....</b>	<b>42</b>
<b>Tabel 17. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I.....</b>	<b>43</b>
<b>Tabel 18. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2023.....</b>	<b>44</b>
<b>Tabel 19. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 20. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I .....</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 21. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I .....</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 22. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I .....</b>	<b>48</b>
<b>Tabel 23. Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness Indeks) terhadap Obat dan Makanan aman dan Bermutu .....</b>	<b>49</b>
<b>Tabel.24 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Triwulan 1 Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness Indeks) terhadap Obat dan Makanan aman dan Bermutu .....</b>	<b>51</b>
<b>Tabel. 26 Target dan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.....</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 27. Perbandingan Realisasi dan capaian Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan dengan. Target renstra 2024.....</b>	<b>55</b>
<b>Tabel 28. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.....</b>	<b>57</b>
<b>Tabel 29. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2023.....</b>	<b>58</b>
<b>Tabel 30. Perbandingan Realisasi dan capaian Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan dengan. Target renstra 2023.....</b>	<b>59</b>
<b>Tabel 31. Perbandingan Target Triwulan 1 dan Realisasi Triwulan 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM.....</b>	<b>63</b>
<b>Tabel 32. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Triwulan 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM.....</b>	<b>64</b>
<b>Tabel 33. Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023.....</b>	<b>66</b>
<b>Tabel 34. Perbandingan Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan I dengan target tahun 2023.....</b>	<b>68</b>
<b>Tabel 35. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi.....</b>	<b>70</b>
<b>Tabel 36. Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.....</b>	<b>71</b>
<b>Table 37. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.....</b>	<b>72</b>

<b>Tabel 38. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.....</b>	<b>74</b>
<b>Table 39. Persentase keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.....</b>	<b>75</b>
<b>Tabel 40. Perbandingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan I dengan target 2023.....</b>	<b>76</b>
<b>Tabel 41. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.....</b>	<b>79</b>
<b>Tabel 42. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan...81</b>	<b>81</b>
<b>Tabel 43. Perbandingan Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan I dengan target 2023.....</b>	<b>82</b>
<b>Tabel 44. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.....</b>	<b>84</b>
<b>Tabel 45. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.....</b>	<b>85</b>
<b>Tabel 46. Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan target tahun 2023.....</b>	<b>86</b>
<b>Tabel 47. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.....</b>	<b>89</b>
<b>Tabel 48. Perbandingan Target Triwulan 1 dan Realisasi Triwulan 1 Indeks Pelayanan Publik di Lingkungan Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.....</b>	<b>89</b>
<b>Tabel 49. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Triwulan 1 Indeks Pelayanan Publik di Lingkungan Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.....</b>	<b>91</b>
<b>Tabel 50. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.....</b>	<b>94</b>
<b>Tabel 51. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.....</b>	<b>97</b>
<b>Table 52. Perbandingan Target Triwulan 1 dan Realisasi Triwulan 1 Tingkat Efektifitas KIE di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.....</b>	<b>98</b>
<b>Tabel 53 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Triwulan 1 Tingkat Efektifitas KIE di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.....</b>	<b>100</b>
<b>Tabel 54. Perbandingan Target Triwulan 1 dan Realisasi Triwulan 1 Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.....</b>	<b>102</b>
<b>Tabel 55. Bobot Progres Tahapan Program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah.....</b>	<b>104</b>

<b>Tabel 56 . Perbandingan Target Triwulan 1 dan Realisasi Triwulan 1 Jumlah Desa Pangan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.....</b>	<b>117</b>
<b>Tabel 57. Perbandingan Target Triwulan 1 dan Realisasi Triwulan 1 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.....</b>	<b>111</b>
<b>Tabel 58. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Triwulan 1 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.....</b>	<b>113</b>
<b>Tabel 59. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I.....</b>	<b>116</b>
<b>Table 60. Target dan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makana.</b>	<b>118</b>
<b>Tabel 61. Target dan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makana</b>	<b>121</b>
<b>Tabel 62. Perhitungan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Triwulan I tahun 2023 BBPOM di Banda Aceh.....</b>	<b>122</b>
<b>Tabel 63. Target dan Realisasi triwulan I Indeks RB BBPOM di Banda Aceh.....</b>	<b>125</b>
<b>Tabel 64. Perbandingan Realisasi Indeks RB BBPOM di Banda Aceh dengan target tahun 2023.....</b>	<b>126</b>
<b>Tabel 65.Target dan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh triwulan I.....</b>	<b>127</b>
<b>Tabel 66. Bobot Penilaian SAKIP.....</b>	<b>128</b>
<b>Tabel 67. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh triwulan I.....</b>	<b>130</b>
<b>Tabel 68. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh dengan target tahun 2023.....</b>	<b>131</b>
<b>Tabel 69. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP hingga triwulan I tahun 2023.....</b>	<b>133</b>
<b>Tabel 70. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Balai Besar POM di Banda Aceh di Triwulan 1 dengan target tahunan.....</b>	<b>133</b>
<b>Tabel 71. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal triwulan I.....</b>	<b>136</b>
<b>Tabel 72. Perbandingan realisasi Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh triwulan I dengan target tahun 2023.....</b>	<b>136</b>
<b>Tabel 73. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh.....</b>	<b>138</b>
<b>Tabel 74 Perbandingan Realisasi triwulan I NKA BBPOM di Banda Aceh dengan target tahun 2023.....</b>	<b>139</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPOM (Semula) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM .....	3
Gambar 2. Struktur Organisasi BPOM (Semula) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM .....	3
Gambar 3. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	9
Gambar 4. Kantor Balai Besar POM di Banda Aceh .....	10
Gambar 5. Peta Wilayah Kerja BBPOM di Banda Aceh .....	11
Gambar 6. Visi dan Misi Balai Besar POM di Banda Aceh .....	17
Gambar 7. Peta Strategi Level 2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh .....	19

**PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJAINSTANSI PEMERINTAH  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh

Nomor: HK.02.02.1A.1A5.01.23.06

**Tanggal 06 Januari 2023**

Ketua : Marina Kaptriyani, ST, MT

Sekretaris : Eko Aprianto, S.Si, Apt

Anggota : Arief Prasetyo Wibowo, S.Farm, Apt.  
Nani Yusraini, S.Si.  
Retno Ayu Kusumaningtyas, S.Farm, Apt  
Novalina BR Purba, S.Farm, M. Pharm, Sci  
Fita Sarafina, SE  
Ike Ramadhanty Daniel, S.Si  
Zuwinda Safitri, S.E  
Endah Kartika, SE  
Fahrizal Arbiansyah, A.Md

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Provinsi Aceh, berkedudukan di Ibukota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh dengan alamat di Jln. Tgk.H.Mohd. Daud Beureueh No. 110, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kode Pos 23126, Telp. (0651) 7411698-23926, Fax.(0651) 22735, 22845. Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, BBPOM di Banda Aceh mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi UPT Badan POM terdiri atas:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM.
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM.
- c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Balai Besar POM di Banda Aceh menjalankan **Tugas dan fungsi** sebagai berikut:

#### Tugas

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Fungsi

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan

Makanan.

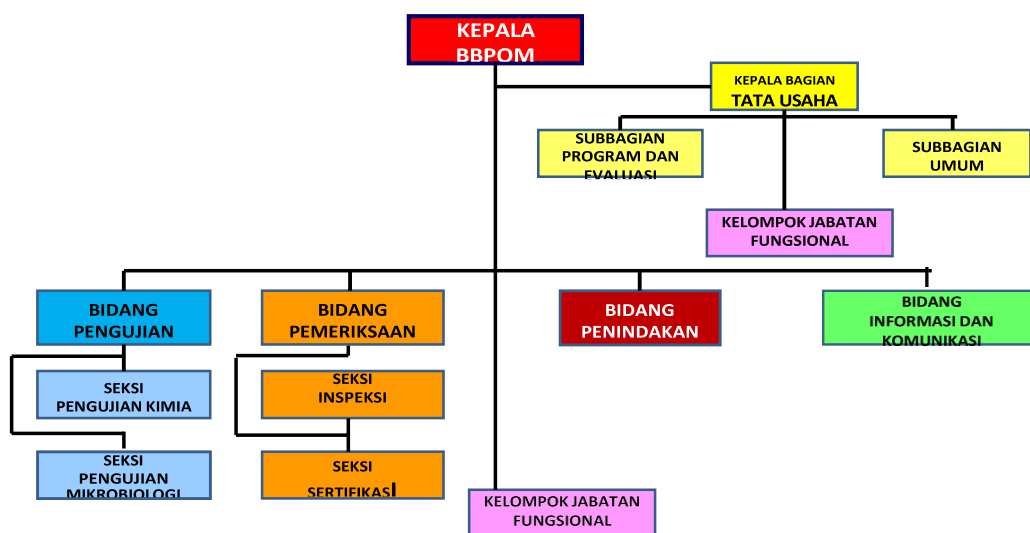
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
7. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing.
8. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
9. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada peran BPOM di Banda Aceh sebagai Lembaga Pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

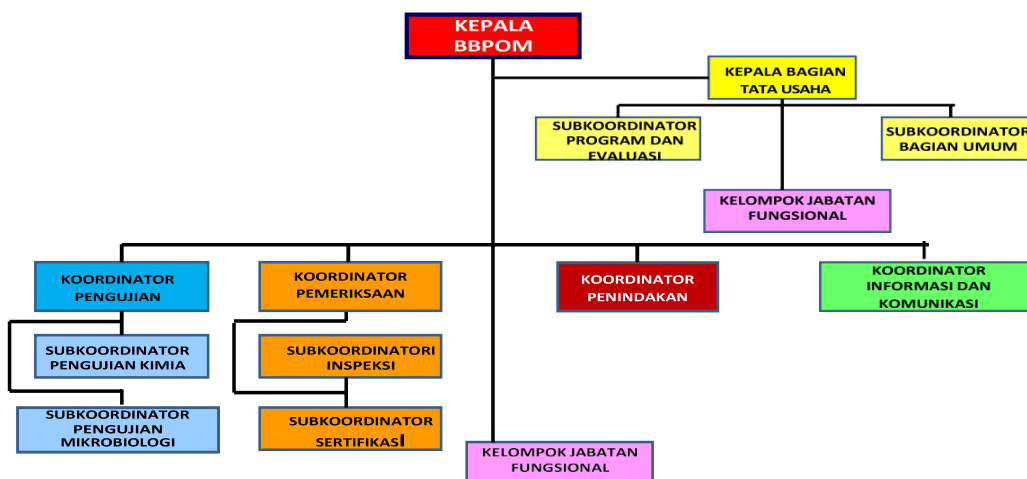
## 1.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya

### Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Banda Aceh.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPOM (Semula) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM



Gambar 2. Struktur Organisasi BPOM (Semula) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM

Berdasarkan Gambar 1 dan 2 dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar POM di Banda Aceh didukung

struktur organisasi terdiri dari 5 bidang serta kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas. Berdasarkan Perka BPOM yang baru Nomor 22 Tahun 2020, terjadiperampingan struktur organisasi dimana terdapat beberapa perubahan jabatan seperti kepala bidang menjadi koordinator bidang dengan jabatan fungsional dan perubahan jabatan pelaksana pada staf menjadi jabatan fungsional umum dan tertentu kecuali Kepala Balai dan Kepala Bagian Tata Usaha. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar POM di Banda Aceh didukung struktur organisasi terdiri dari 5 bidang serta kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. Bidang Pengujian, mempunyai tugas dan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.
- Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.

Bidang Pengujian terdiri dari:

- Subkoordinator Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia obat dan makanan.
- Subkordinator Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi obat dan makanan.

b. Bidang Pemeriksaan, mempunyai tugas dan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan.
- Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
- Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi produk obat dan makanan.

- Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Bidang Pemeriksaan terdiri dari:
  - Subkoordinator Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
  - Subkoordinator Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

c. Bidang Penindakan, mempunyai tugas dan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

d. Bidang Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas dan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerjasama di bidang

pengawasan Obat dan Makanan.

- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

e. Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas dan fungsi:

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
- Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana.
- Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- Subkoordinator Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja.
- Subkoordinator Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi, komunikasi, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

### 1.3 Aspek Strategis Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan system pengawasan *full spectrum* mulai dari *premarket* hingga *post market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. BBPOM di Banda Aceh sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 adalah melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Aceh meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Kapasitas BBPOM di Banda Aceh sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi menghadapi permasalahan pokok BBPOM di Banda Aceh sesuai dengan peran dan kewenangannya, yaitu:

1. Strategi Pencegahan: melalui perkuatan regulasi, pelaksanaan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE), pemberdayaan masyarakat serta peningkatan koordinasi lintas sektor.
2. Strategi pengawasan: melalui perkuatan lintas sektor, perkuatan manajemen dan utilitasi database, intensifikasi pengawasan berbasis resiko, dan perkuatan implementasi regulasi.
3. Strategi penindakan: difokuskan pada tahap importasi, produksi dan distribusi obat melalui tiga pendekatan, yakni pemetaan kasus dan potensi rawan kasus, kerjasama lintas sektor terkait dan penyusunan pedoman kerja.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Banda Aceh dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

## 1.4 Analisis Lingkungan Strategis Internal

### 1.4.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh per 30 September 2022 adalah 78 orang yang terdiri dari Kepala Balai 1 orang, Bagian Tata Usaha 20 orang, Bidang Pemeriksaan 14 orang, Bidang Penindakan 6 orang, Bidang Pengujian 30 orang, Bidang Infokom 7 orang. (terjadi perubahan jumlah orang pada Bagian Tata Usaha dan Bidang Pemeriksaan, dengan rincian: 1 orang pindah jabatan dan mutasi ke Bidang Pemeriksaan dan 1 orang pensiun di Bidang Pengujian).

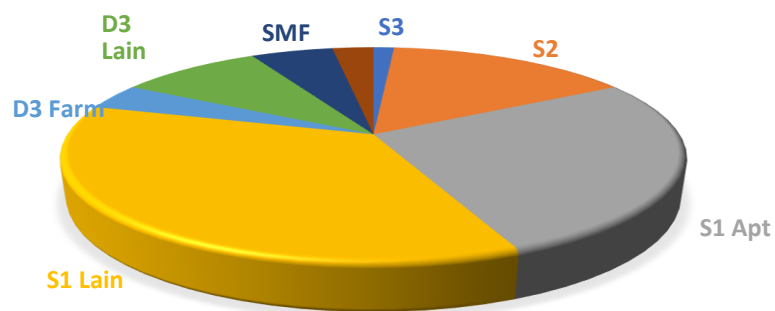
Tenaga Pramubakti 38 orang, terdiri dari Satpam 6 orang, *Cleaning Service* 5 orang, Supir 4 orang, pemelihara sarana prasarana 1 orang dan tenaga IT 2 orang, tenaga teknis 20 orang di berbagai bidang sehingga total pegawai berjumlah 105 orang. Profil pegawai berdasarkan pendidikan dapat dilihat tabel berikut:

Table 1. Profil Pegawai berdasarkan pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan								Jumlah Pegawai
		S3	S2	S1 Apt	S1 Lain	D3 Farm	D3 Lain	SMF	SLTA Umum/Kejuruan	
1	Kepala Balai		1							1
2	Bagian Tata Usaha		2		12		5		1	20
3	Bidang Pemeriksaan	1	2	8	2			1		14
4	Bidang Pengujian		4	9	10	3	2	2		30
5	Bidang Penindakan			3	2				1	6

6	Bidang Informasi dan Komunikasi		3	1	2			1		7
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>78</b>

Jumlah pegawai sebanyak yang tertera pada gambar di atas belum memadai untuk kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh dengan luas daerah 56.770, 81 Km<sup>2</sup> dan jumlah Kabupaten 18 dan jumlah Kota 5 serta jumlah Kecamatan 284. Beberapa tenaga yang sangat dibutuhkan adalah Sarjana Akuntansi, sarjana Hukum, Teknik Elektro, Kimia, Biologi, dan Sarjana Farmasi/Apoteker dan Teknologi Informasi.



Gambar 3. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Untuk mendukung tugas Balai Besar POM di Banda Aceh sesuai dengan peran dan fungsinya sangat diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Proyeksi kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) di Balai Besar POM di Banda Aceh mulai tahun 2020-2024 berturut turut sebesar 49, 51, 53, 54 dan 56 orang, dengan prediksi SDM yang tersedia hingga 2024 adalah 127 orang. Standar kebutuhan SDM berdasarkan ABK terdapat kenaikan rata-rata sebesar 3 orang setiap tahunnya dengan adanya beberapa pegawai yang pensiun/pindah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.

#### 1.4.2. Sumber Daya Lainnya

Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki 3 buah gedung yang terdiri 2 gedung kantor dan 1 gedung laboratorium yang berdiri pada luas lahan Balai Besar POM di Banda Aceh seluas 3.262 m<sup>2</sup> dengan luas lantai bangunan sebesar 3.169 m<sup>2</sup>, listrik bersumber dari PLN dengan daya sebesar 53 KVA dan 41.5 KVA dilengkapi genset 200 KVA, 10 unit kendaraan dinas. BBPOM di Banda Aceh memiliki laboratorium pengujian kimia, laboratorium pengujian mikrobiologi, peralatan dan instrumen



*Gambar 4. Kantor Balai Besar POM di Banda Aceh*

modern seperti PCR, AAS, Kromatografi Cair Kinerja Tinggi, Kromatografi Gas, GC-MS, Spectrofotometer, Elisa Reader dan lain-lain. Selain itu, Balai Besar POM di Banda Aceh dalam mewujudkan Visi, Misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu yang telah tersertifikasi yaitu: ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2008 dan akreditasi laboratorium ISO/IEC 17025:2017 untuk seluruh bisnis prosesnya.

#### 1.4.3. Keunggulan BBPOM di Banda Aceh

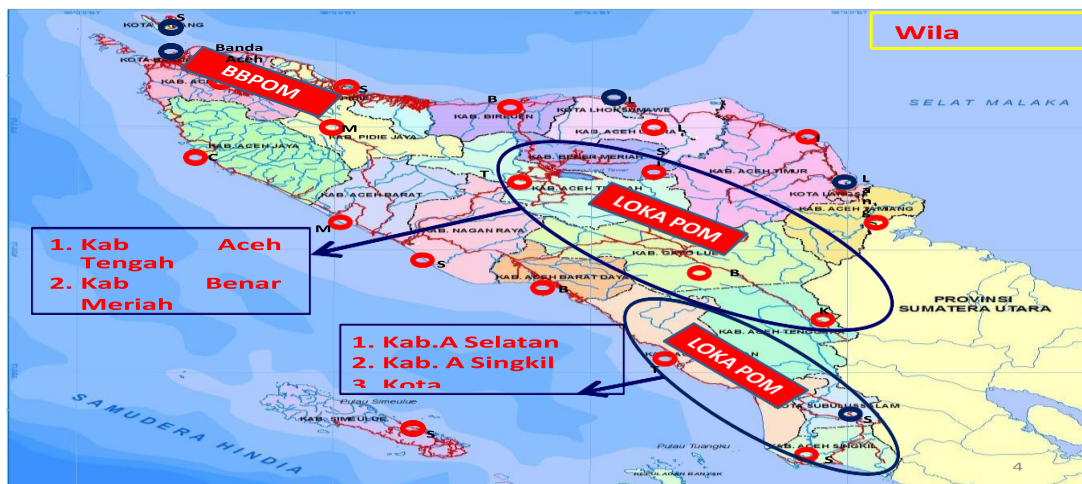
- Laboratorium Rujukan Pengujian DNA Babi.
- Laboratorium Unggulan untuk pengujian Ganja.
- Mempunyai tenaga ahli yang bertugas sebagai evaluator yang aktif membantu proses pendaftaran pangan melalui *e-registration*.
- Memiliki 3 unit mobil laboratorium keliling yang menjangkau seluruh wilayah kab/kota di Provinsi Aceh.
- Memiliki 1 unit mobil Penindakan, yang dapat difungsikan untuk melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka langsung di TKP (Tempat

Kejadian Perkara).

- Memiliki 1 unit mobil Insenerator, yang aman dan ramah lingkungan, digunakan untuk melakukan pemusnahan barang temuan dan barang bukti.

#### 1.4.4. Eksternal

##### Kondisi Geografis dan Demografis



Gambar 5. Peta Wilayah Kerja BBPOM di Banda Aceh

Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah di Provinsi Aceh terletak antara  $01^{\circ} 58' 37,2'' - 06^{\circ} 04' 33,6''$  LU dan  $94^{\circ} 57' 57,6'' - 98^{\circ} 17' 13,2''$  BT. dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah: Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Barat dengan Samudera Indonesia. Pemerintahan di Provinsi Aceh dibagi ke dalam 18 wilayah Kabupaten dan 5 wilayah kota dengan total 23 Kabupaten/Kota dan luas wilayah 56.770,81 km<sup>2</sup>. Seiring dengan perkembangan organisasi, untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh, maka dibentuklah 2 (dua) LOKA POM berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dengan terbentuknya 2 (dua) LOKA POM tersebut, sehingga luas cakupan wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi berkurang menjadi 34.843,91 km<sup>2</sup>. Luas cakupan pengawasan Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi 12 Kabupaten dan 4 Kota (16 Kab/Kota). Dari 16 Kabupaten/Kota yang diawasi oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, 2 Kabupaten merupakandaerah kepulauan terluar, yaitu Kota Sabang dan Kabupaten Simeulue. Sedangkan untuk LOKA Aceh Selatan dengan cakupan pengawasan 3 (tiga) Kabupaten, yaitu: Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil, dan untuk LOKA Aceh Tengah dengan cakupan pengawasan 4 (empat) Kabupaten: Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara.

#### **1.4.5 Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi**

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Aceh meliputi industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, dan industri pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

*Tabel 2. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi*

NO	JENIS SARANA	JUMLAH SARANA	
<b>Sarana Distribusi</b>			
1.	PBF	27	Sarana
2.	Apotek	411	Sarana
3.	Toko Obat	474	Sarana
4.	Klinik	239	Sarana
5.	Rumah Sakit	62	Sarana
6.	Puskesmas	306	Sarana
7.	GFK	17	Sarana
8.	Distribusi Makanan	2289	Sarana
9.	Distribusi Kosmetik dan Salon	901	Sarana
10.	Distribusi OT dan Suplemen Kesehatan	320	Sarana
<b>TOTAL SARANA DISTRIBUSI</b>		<b>5046</b>	<b>Sarana</b>
<b>Sarana Produksi</b>			
1.	Industri Farmasi	0	Sarana
2.	Industri Obat Tradisional	0	Sarana
3.	UMOT	18	Sarana
4.	UKOT	11	Sarana
5.	Industri Kosmetik	7	Sarana
6.	Industri Makanan (MD)	83	Sarana
7.	PIRT	1469	Sarana
<b>TOTAL SARANA PRODUKSI</b>		<b>1588</b>	<b>Sarana</b>

## 1.5 Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja BBPOM di Banda Aceh antara lain:

### 1. Produk pangan yang masih mengandung bahan berbahaya

BBPOM di Banda Aceh sudah melakukan pembinaan dan koordinasi dengan lintas sektor sehingga sejak tahun 2020 produk mie basah di wilayah Kota Banda Aceh sudah bebas dari boraks. Upaya akan terus ditingkatkan agar mie basah Kab/Kota yang lain juga bebas dari bahan berbahaya. Selain mie basah, kerupuk tempe juga masih mengandung boraks sehingga perlu pembinaan dan koordinasi yang intensif dengan lintas sektor terkait.

## **2. Kosmetik dan Obat Tradisional yang beredar tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya**

Permintaan masyarakat Aceh terhadap kosmetik terutama pemutih wajah sangat tinggi pada kaum ibu dan remaja namun masih ditemukan mengandung Merkuri. Selain itu, obat tradisional dan obat kuat juga sangat banyak diminati namun sangat berisiko terhadap kesehatan karena mengandung Sildenafil Sitrat. Hal ini merupakan isu yang sangat mengkhawatirkan di masyarakat.

## **3. Tindak lanjut Pemerintah Daerah belum optimal terhadap hasil pengawasan terhadap industri rumah tangga pangan (IRTP)**

Masih ditemukan IRTP yang tidak memiliki nomor izin edar PIRT dan persyaratan hygiene dan sanitasi yang masih belum memenuhi ketentuan. Tindak lanjut hasil pengawasan oleh Pemda belum optimal sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sehingga pengawasan yang menjadi kewenangan Pemda belum dilaksanakan semestinya. Hal ini disebabkan karena kompetensi dan jumlah SDM Pemda belum memadai dan pola mutasi internal Pemda yang terlalu sering.

## **4. Kondisi Geografis Provinsi Aceh**

Berdasarkan kondisi geografis, Provinsi Aceh berhadapan dengan negara tetangga (Malaysia, Thailand, dan India) dan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, yang berpotensi sebagai pintu masuk produk Obat dan Makanan dari luar.

## **5. Garam Konsumsi di Provinsi Aceh belum seluruhnya mengandung Iodium**

Aceh merupakan salah satu daerah penghasil garam karena memiliki garis pantai yang sangat panjang, namun garam yang

dihasilkan masih diproduksi secara tradisional dan belum ditambahkan Iodium. Untuk itu diperlukan perkuatan koordinasi dengan lintas sektor untuk menghasilkan garam yang beriodium dalam rangka menurunkan angka stunting di Aceh.

#### **6. Peraturan Daerah tentang Jaminan Produk Halal**

Dengan diberlakukannya Qanun Produk Halal Nomor: 08 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Provinsi Aceh, sehingga perlu perkuatan koordinasi dan sinergitas Balai Besar POM di Banda Aceh dengan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh.

#### **7. Penjualan Produk Obat dan Makanan secara online**

Tidak bisa dipungkiri bahwa jual beli secara online mempermudah masyarakat untuk bertransaksi. Namun sangat disayangkan aplikasi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan semata. Masyarakat harus dicerdaskan agar tidak tertipu promosi berlebihan berupa khasiat yang lebih, harga yang murah dan iming-iming bonus dari penjual. Walaupun transaksi dilakukan secara on line namun moto CEK KLIK harus tetap dilakukan. Cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek tanggal kedaluarsa. BBPOM di Banda Aceh dan Loka POM melakukan patrol siber untuk mengawasi produk Obat dan Makanan yang beredar secara online.

#### **8. Pendampingan UMKM oleh Balai Besar POM di Banda Aceh**

Salah satu program utama pemerintah adalah peningkatan produktivitas UMKM sehingga produk-produk UMKM dapat berdaya saing di pasar internasional. Untuk mendukung UMKM yang berdaya saing banyak aspek pembinaan yang harus dilakukan diantaranya pendampingan terhadap UMKM sehingga memiliki kapabilitas untuk menjamin mutu, keamanan dan manfaat pada

komoditas pangan, obat tradisional dan kosmetik yang diproduksi.

#### **9. Pandemi Covid-19**

Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia pada pertengahan Maret 2020 memberikan dampak terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di BBPOM di Banda Aceh. Badan POM RI membuat kebijakan dan berbagai inovasi selama masa pandemi Covid 19 dengan melaksanakan kegiatan secara daring.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas Pembangunan Jangka menengah, Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai unit pelaksana teknis Badan POM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya harus menyusun Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran strategis yang mengacu kepada Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024. Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan penjabaran Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai salah satu unit pelaksana teknis di wilayah Provinsi Aceh. Penyusunan sasaran dan indikator kinerja pada rencana strategis dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Banda Aceh serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan **Visi dan Misi Badan POM 2020-2024** yaitu:

#### VISI

**“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

*Gambar 6. Visi dan Misi Balai Besar POM di Banda Aceh*

## MISI

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan public yang prima di bidang Obat dan Makanan

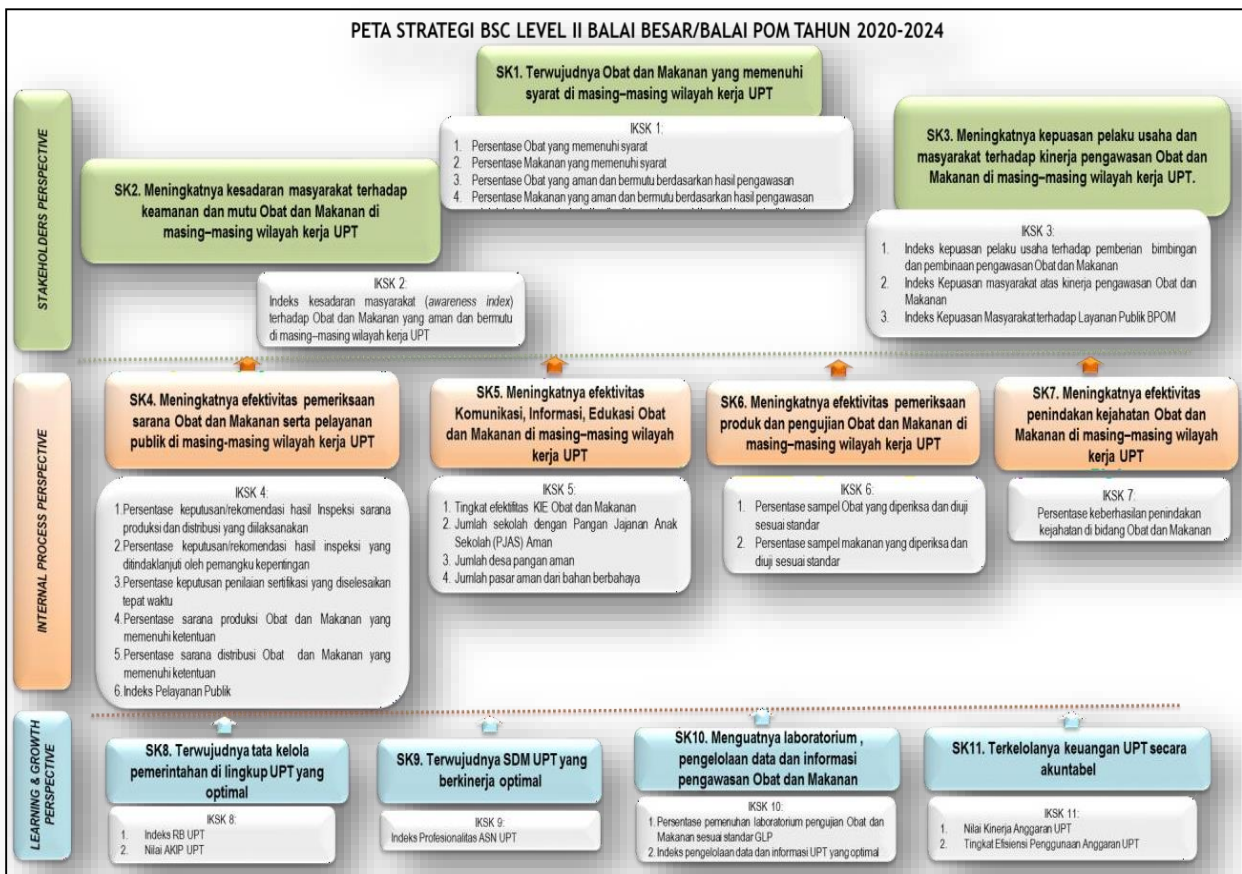
Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan

Makanan.

7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai Besar POM di Banda Aceh berdasarkan Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 7. Peta Strategi Level 2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh



## 2.2 Rencana Kerja Tahun 2023

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2023 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2023. RKT Tahun 2023 mengacu pada

## Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023.

Table 3. Rencana Kinerja Tahun 2023 Balai Besar POM di Banda Aceh

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	52
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	81
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93.4
		Indeks kepuasan masyarakat atas Kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73.62
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	97
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil	100
		Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	62

	pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOMdi Banda Aceh dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOMdi Banda Aceh	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh	4.25
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	79
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	72
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	19
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing- masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal	Indeks RB BBPOM di Banda Aceh	81.2
		Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh	78.9

9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh	83
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	2.5
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banda Aceh secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	92.1

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BBPOM di Banda Aceh tahun 2020-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 27.258.618.000,- (Dua puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya dapat terwujud pada tahun 2023 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di Banda Aceh.

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yaitu Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020- 2024. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di

Banda Aceh Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 4. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	52
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	81
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93.4
		Indeks kepuasan masyarakat atas Jaminan Keamanan Obat dan Makanan	73.62
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100

		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh	4.40
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing- masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	72
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	19
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan dimasing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di BandaAceh yang optimal	Indeks RB BBPOM di Banda Aceh	81.2
		Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh	78.9
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh	83
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	2.5
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banda Aceh secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	92.1

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai unit kerja Eselon II wajib

menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi **output** dan **outcome** yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi.

#### **2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)**

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM di Banda Aceh dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan pada triwulan berikutnya. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Banda Aceh Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini:



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BBPOM di Banda Aceh  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	749.071.600,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	547.192.800,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	607.507.400,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	426.568.800,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	48.603.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												81	69.551.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												93.4	157.070.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												73.62	51.940.000,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												93	136.477.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	318.543.000,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	107.280.000,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	333.050.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	81.473.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	718.630.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT						4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40		569.918.000,00
16.	Persentase UMKH yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	7	18	35	42	55	62	65	67	70	71	74	79	52.594.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			92	92	92	92	92	92	92	92	92		218.077.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman		20	25	30	40	50	60	75	80	90	95	72	450.798.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman		15	20	25	30	50	60	70	80	85	95	25	658.930.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	15	25	32	42	53	63	76	84	88	96	100	90.408.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	7	15	27	35	44	57	66	77	92	94	96	100	58.107.400,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	8	10	27	28	49	62	65	70	74	76	78	80	698.310.000,00
23.	Indeks RB UPT												81.2	274.760.000,00
24.	Nilai AKIP UPT												78.9	131.300.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												83	316.670.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												84	2.703.482.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1.95	2.25	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	75.000.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		30	50	60	65	71	71	72	73	74	75	92.1	16.216.906.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		10	15	30	45	60	70	80	90	95	95	19	390.400.000,00
Total												27.258.618.000,00		

Banda Aceh, 22 Desember 2022

Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh



Yudi Noviani, M.Sc.Tech., Apt.

## Metode Pengukuran

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Pencapaian Strategis

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

Nilai pencapaian sarannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS 2 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2}{2}$$

$$NPS 3 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3}{3}$$

$$NPS 4 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3 + 1NPI 4}{4}$$

$$NPS 5 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3 + 1NPI 4 + 1NPI 5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Menunjuk 1 orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Banda Aceh yang disahkan oleh SK Kepala BPOM.
2. Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Banda Aceh.
3. Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada database online secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai.
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SAKTI (Capaian Output), SMART DJA, monev Bappenas, RHPK, BOC dan Aplikasi e-performance.
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC) serta pengukuran kinerja secara cascading dari level eselon 2 hingga level eselon 3 dan eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara berkala untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BBPOM di Banda Aceh guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2023, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, selain itu juga dilakukan analisis atas pencapaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dengan membuat format matriks tindak lanjutnya.

*Tabel 6. Pencapaian Sasaran kegiatan*

NO.	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	92.85	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	-	
3.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	-	

NO.	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	94.46	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	105.5	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	115.37	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	29.98	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal	-	
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di BandaAceh yang berkinerja optimal	-	
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	-	-
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banda Aceh secara Akuntabel	137.73	<b>Tidak dapat disimpulkan</b>

Balai Besar POM di Banda Aceh telah menetapkan 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan. Dari 29 indikator tersebut, keseluruhannya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut:

**Tabel 7. Pencapaian Indikator Kinerja Utama**

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>	<b>KRITERIA</b>
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	107.77	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	110.79	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87.15	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	64.10	<b>Tidak dapat disimpulkan</b>
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	94.44	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	-	
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	
8.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100.00	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	112.77	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	86.54	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	103.57	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
15.	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banda Aceh	-	

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KRITERIA
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	69.05	Tidak Memenuhi Ekspektasi
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	102.15	Memenuhi Ekspektasi
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100.00	Memenuhi Ekspektasi
19.	Jumlah Desa pangan aman	125.00	Tidak dapat disimpulkan
20.	Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	266.67	Tidak dapat disimpulkan
21.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	150.55	Tidak dapat disimpulkan
22.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	80.19	Belum Memenuhi Ekspektasi
23.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	29.98	Tidak Memenuhi Ekspektasi
24.	Indeks RB BBPOM di Banda Aceh	-	
25.	Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh	-	
26.	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh	-	
27.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	
28.	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	116.0	Memenuhi Ekspektasi
29.	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	138.73	Tidak dapat disimpulkan

Dari 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU), 9 (sembilan) indikator dengan kriteria capaian **Memenuhi ekspektasi**, 4 (empat) indikator dengan kriteria capaian **Belum memenuhi ekspektasi**, 5 (lima) indikator dengan kriteria capaian **Tidak Dapat Disimpulkan**, 2 (dua) indikator dengan kriteria capaian **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, 9 (sembilan) indikator yang dinilai tahunan.

## Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh

Sasaran Strategis 1 dicapai dengan NPS 92.85 dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi.

### Indikator Kinerja

#### 1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

##### a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I

Tabel 8. Target dan Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat

Indikator Kinerja	Target triwulan I 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	96.99	107.77	Memenuhi ekspektasi

Rumus perhitungan Persentase obat yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut:  
 $\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$

Obat yang dimaksud dalam IKU ini mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1). Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar). 2). Produk kadaluarsa. 3). Produk rusak. 4). Tidak memenuhi ketentuan penandaan. 5). Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat dari hasil pemeriksaan dan pengujian, yaitu sebanyak 208 sampel yang disampling, yang masuk ke laboratorium

207 sampel. Sampel yang diperiksa dan diuji sebanyak 133 sampel dengan rincian 129 sampel MS (memenuhi syarat), dan 5 (TMS) sampel tidak memenuhi syarat.

Persentase capaian target indikator sasaran sebesar 107.77% dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

**b. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2023**

*Tabel 9. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2023*

Indikator Kinerja	Target 2022 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	96.99	107.77	<b>Memenuhi ekspektasi</b>

Capaian kinerja persentase Obat yang memenuhi syarat pada triwulan I mengalami peningkatan dari tahun 2022. Realisasi kinerja triwulan satu yaitu 96.99% terhadap target tahun 2023 yaitu 90%. Capaian kinerja triwulan satu sebanyak 107.77% mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu 85.66%.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Realisasi indikator persentase Obat yang memenuhi syarat belum memenuhi target 96.99%. Hal ini disebabkan karena sampel yang tidak memenuhi syarat tidak terlalu banyak. Dari 208 sampel yang diperiksa, terdapat 1 sampel tidak memiliki ijin edar sehingga sampel yang masuk ke laboratorium menjadi 207 sampel. Dari 207 sampel yang masuk ke laboratorium yang selesai diperiksa dan diuji sebanyak 133 sampel dengan rincian 129 sampel memenuhi syarat (MS) dan 4 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Empat sampel yang TMS pengujian yaitu 3 sampel Obat tradisional dan 1 sampel obat kuasi. Penurunan jumlah sampel TMS disebabkan penurunan sampel yang TMK penandaan dan label. Terbitnya surat Direktur Pengawasan Kosmetik pada 20 Pebruari 2023 No. : PW.03.08.4.44.02.23.01 tentang penyamaan kategorisasi temuan TMK penandaan dan iklan kosmetik tentang kategorisasi temuan penandaan dan iklan yang diatur lebih rinci mengakibatkan penarikan kesimpulan lebih jelas dan hasilnya TMK penandaan menjadi lebih sedikit. Pada

tahun 2022 Surat Direktur Pengawasan Kosmetik No. TPW.03.08.44.4431.05,22.1509 tanggal 31 Mei 2022 tentang penyamaan kategorisasi temuan TMK penandaan dan iklan kosmetik menyebabkan semakin banyak produk kosmetik TMK penandaan/label karena kategori suatu produk kosmetik TMK tidak terlalu jelas sehingga dapat menimbulkan persepsi yang berbeda antar tim pemeriksaan dengan pusat.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Berbagai upaya yang telah dilakukan BBPOM di Banda Aceh untuk meningkatkan realisasi kinerjanya antara lain:

1. Melakukan pengawasan rutin serta memberikan pembinaan pada sarana produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh agar memproduksi dan mendistribusikan produk Obat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Meningkatkan kompetensi petugas terkait dengan pemeriksaan label/penandaan agar mempunyai persepsi yang sama dengan pusat.
3. Melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan label/penandaan dengan melaporkan kepada direktorat terkait dan ditembuskan kepada UPT wilayah dimana sarana produksi berada.
4. Meningkatkan kompetensi penguji dengan memberikan pelatihan agar hasil pengujian dapat dijamin mutunya.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). Matriks tindak lanjut.**

*Tabel 10. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya*

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala	Sudah	Sudah dilakukan peningkatan pencapaian kinerja secara berkala	14 April 2023

			dengan konsisten melalui rapat evaluasi triwulanan	
--	--	--	--	--

Beberapa rekomendasi terhadap capaian kinerja 2023 sudah dilakukan diantaranya sudah dilakukan rapat pembahasan terkait evaluasi triwulan pada tanggal 14 April 2023

## 2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

### a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I

*Tabel 11. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I*

Indikator Kinerja	Target triwulan I 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.50	89.19	110.80	<b>Memenuhi ekspektasi</b>

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh menggunakan formula:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan oleh BBPOM di Banda Aceh. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1). Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa

nomor izin edar). 2). Produk kedaluwarsa. 3). Produk rusak. 4). Tidak memenuhi ketentuan label. 5). Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Dari 74 sampel acak yang diperiksa dan uji sebanyak 66 sampel memenuhi syarat (MS) dan 8 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Capaian indikator persentase makanan triwulan I yaitu 110.80% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

**b. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2023**

**Tabel 12. Realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.50	89.19	110.80	<b>Memenuhi ekspektasi</b>

Realisasi kinerja triwulan I yaitu 89.19% dengan capaian kinerja 110.80% terhadap target tahun 2023. Berdasarkan hasil tersebut BBPOM di Banda Aceh optimis dapat memenuhi target dengan strategi yang lebih baik.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Capaian indikator persentase makanan yang memenuhi syarat memenuhi ekspektasi efektif disebabkan produk makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sedikit. Jumlah sampel MS yang lebih besar (66 MS dari 74 sampel). Dari data tahun lalu TMS banyak disebabkan oleh TMK Mayor oleh produk PIRT atau produsen yang TMK label.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Analisis yang perlu dilakukan untuk menunjang keberhasilan indikator kinerja ini adalah:

1. KIE kepada produsen/ pelaku usaha mengenai pelabelan dan penandaan pada produk untuk menjamin produk aman dan bermutu (mencantumkan

- tgl dan kode produksi, komposisi, berat bersih, label halal, dll)
2. KIE kepada distributor dan penjual untuk memperhatikan label dan penandaan produk yang dijual agar menjamin produk aman dan bermutu.
  3. KIE kepada masyarakat untuk selalu melakukan CEKKLIK terhadap produk-produk yang dikonsumsi.
  4. Menjamin kualitas pelayanan dan pengujian dengan mengikuti system mutu 17025:2015 dan QMS 9001:2017 dalam hal ini melakukan audit internal maupun eksternal sehingga hasil uji reliable dapat dipertahankan.
  5. Peningkatan kegiatan penyidikan terkait temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan sehingga menimbulkan efek jera agar kesalahan yang sama tidak terulang di kemudian hari.
- e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). Matriks tindak lanjut.

*Tabel 13. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya*

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala	Sudah	Sudah dilakukan peningkatan pencapaian kinerja secara berkala dengan konsisten melalui rapat evaluasi triwulanan	14 April 2023

Beberapa rekomendasi terhadap capaian kinerja 2023 sudah dilakukan diantaranya sudah dilakukan rapat pembahasan terkait evaluasi triwulan pada tanggal 14 April 2023

### 3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

#### a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I

Tabel 14. Target dan Realisasi Persentase Obat Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan triwulan I

Indikator Kinerja	Target triwulan I 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	90	88.89	98.77	Belum memenuhi ekspektasi/Kurang efektif

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

a). Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). b). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1). Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar). 2). Produk kadaluarsa. 3). Produk rusak. 4). Tidak memenuhi ketentuan penandaan. 5). Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian dari 13 sampel targeted terdapat 1 sampel MS (memenuhi syarat) dan 2 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Sisanya belum selesai diuji. Capaian realisasi 98.77% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi**.

#### b. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2023

*Tabel 15. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2023*

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	90	88.89	98.77	<b>Belum memenuhi ekspektasi/Kurang efektif</b>

Pada tahun 2023 target kinerja adalah 90%, realisasi triwulan I sebanyak 88.89% dengan capaian 98.77% sehingga hasilnya belum memenuhi ekspektasi.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penyebab capaian indikator kinerja persentase Obat yang aman dan bermutu belum memenuhi ekspektasi/kurang efektif adalah hasil pengawasan sampel Obat yang disampling secara targeted masih menunjukkan trend tidak memenuhi syarat. Dari 45 sampel yang disampling, terdapat 39 sampel hasil uji MS dan 6 sampel TMS yaitu produk obat tradisional. Hasil pemeriksaan terdapat TMK label/penandaan pada 3 sampel obat tradisional. Rendahnya capaian indikator ini perlu perhatian serius, walaupun telah terjadi penurunan TMK label/penandaan pada penyumbang TMK terbesar pada tahun 2022 yaitu produk kosmetik, produk obat tradisional masih ditemukan TMK/label penandaan. Hal ini perlu evaluasi kembali apakah aturan mengenai label/kemasan perlu diperbaharui ataukah memang pengetahuan tentang label/kemasan ini masih rendah karena KIE yang tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan komitmen pelaku usaha rendah terkait masalah kemasan/label yang sesuai aturan yang berlaku.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

BBPOM Aceh sudah melakukan serangkaian upaya untuk melindungi masyarakat dari obat yang tidak memenuhi syarat. Sampel yang memiliki resiko rentan dan

memiliki riwayat yang tidak bagus terkait produksi ataupun mutunya diawasi dengan menyampling dan melakukan pengujian. Masih banyaknya sampel targeted yang tidak memenuhi syarat yang umumnya diakibatkan dari TMK label/penandaan maka BBPOM melakukan kegiatan Memperketat pengawasan terhadap sampel targeted dengan melakukan sampling dan pengujian produk Obat yang beredar dengan Membekali petugas dengan kompetensi untuk meningkatkan kompetensinya terkait label/penandaan saat melakukan KIE kepada pelaku usaha terkait label/penandaan serta cara produksi obat tradisional yang baik. Perlu juga melakukan KIE kepada masyarakat tentang produk Obat yang aman dan bermutu. Selain itu juga perlu upaya menindak lanjuti hasil pengawasan produk yang produsennya bukan di wilayah Aceh dengan melaporkan ke direktorat terkait dan memberi tembusan kepada UPT terkait selain meningkatkan upaya penyidikan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang sering melanggar ketentuan peredaran Obat di wilayah Aceh.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). Matriks tindak lanjut.

*Tabel 16. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya*

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala	Sudah	Sudah dilakukan peningkatan pencapaian kinerja secara berkala dengan konsisten melalui rapat evaluasi triwulanan	14 April 2023

Beberapa rekomendasi terhadap capaian kinerja 2023 sudah dilakukan diantaranya sudah dilakukan rapat pembahasan terkait evaluasi triwulan pada tanggal 14 April 2023 untuk meningkatkan capaian kinerja triwulan berikutnya.

#### 4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

##### a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I

Tabel 17. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I

Indikator Kinerja	Target triwulan I 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	52.00	33.33	64.10%	Tidak memenuhi ekspektasi/Tidak efektif

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan menurut UU No.18 tahun 2012 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi yang disampling Balai. Sampel yang disampling Loka menjadi kinerja Loka tersebut. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan **tidak memenuhi ekspektasi**. Namun terdapat kesalahan pada pengisian data RAPK, Jumlah sampel targetted yang diperiksa dan diuji pada TW 1 adalah 13 sampel, dimana 11 sampel (GGL) sudah selesai uji pada bulan Februari dengan hasil MS, dan 2 sampel selesai uji pada bulan Maret dengan hasil TMS (ALT). Dengan demikian hasil ini dikoreksi menjadi realisasi TW 1 adalah 84,61% dan Capaian adalah 162,71%. Capaian yang besar disebabkan sampel GGL yang merupakan kajian pada bulan Februari dimasukkan ke kategori sampel targetted dengan hasil MS, sehingga menyebabkan jumlah capaian sangat besar.

**b. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2023**

*Tabel 18. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2023*

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	52.00	33.33	64.10%	<b>Tidak memenuhi ekspektasi/Tidak efektif</b>

Capaian kinerja triwulan I terhadap target tahun 2023 masih cukup rendah karena kesalahan pengisian RAPK. Penjelasan terkait ini dijelaskan pada perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I. TMS disebabkan terdapat coklat yaitu TMS mikrobiologi ALT.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Penurunan kinerja disebabkan oleh kesalahan pengisian RAPK, perlu dilakukan rekomendasi perbaikan RAPK. Dara real pengujian sampel Targetted pada TW ini adalah 13 sampel dengan hasil 11 MS dan 2 TMS. Capaian menjadi 162,71 % . Realisasi pada tahun 2022 adalah 84.91 %, tetapi target 2023 tidak disesuaikan dengan realisasi tahun 2022, sehingga capaiannya tidak dapat disimpulkan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kesalahan terjadi pada pengisian RAPK sehingga menyebabkan target tidak memenuhi ekspektasi. Kedepannya perlu dilakukan monev pengisian RAPK dan konfirmasi ke penanggungjawab kegiatan. Perlu duduk bersama untuk melihat apakah terjadi kesalahan rumus atau pengisian oleh penanggung jawab. Batas waktu pengisian RAPK internal juga perlu dievaluasi karena sebelumnya terjadi kesalahan rumus dan sudah dikonfirmasi ke pusat, tetapi jarak pengisian dari waktu perbaikan sangat singkat sehingga pengisian tidak dapat dievaluasi dengan segera. Untuk target indikator kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan perlu dilakukan penyesuaian sehingga kriteria capaian dapat disimpulkan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). Matriks tindak lanjut.

Mengingat dua tahun berturut-turut capaian kinerja BBPOM di Banda Aceh tidak dapat disimpulkan, maka tahun 2023 BBPOM Aceh akan mengajukan perubahan target kinerja sesuai realisasi kinerja tahun 2022.

*Tabel 19. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya*

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Penurunan kinerja disebabkan oleh kesalahan pengisian RAPK, perlu dilakukan rekomendasi perbaikan RAPK	Belum	Perlu dilakukan monev pengisian RAPK setiap bulan	Tanggal 5 setiap bulan
2.	Perbaikan target	Belum	Pembuatan surat untuk perbaikan target	Mei 2023

## 5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat

### a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I

Tabel 20. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I

Indikator Kinerja	Target triwulan I 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Fortifikasi yang memenuhi syarat	90.00	85.00	94.44	Belum memenuhi ekspektasi/Kurang efektif

Realisasi Indikator pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Belum Memenuhi ekspektasi/Kurang efektif karena banyaknya sampel tidak memenuhi syarat fortifikasi. Dari 55 sampel yang disampling, 35 belum selesai uji, sudah selesai uji 20 sampel dimana 17 sampel MS (memenuhi syarat) dan 3 sampel TMS (tidak memenuhi syarat).

### b. Perbandingan Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2023

Tabel 21. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I

Indikator Kinerja	Target I 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Fortifikasi yang memenuhi syarat	90.00	85.00	94.44	Belum memenuhi ekspektasi/Kurang efektif

Realisasi Indikator pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Belum Memenuhi ekspektasi/Kurang efektif dimana capaian realisasi hanya 85% dari target tahun 2023 yaitu 90.00% sehingga capaian menjadi 94.44% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi.

### c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penyebab utama indikator kinerja Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat belum memenuhi ekspektasi adalah tingginya sampel TMS

pada produk fortifikasi. Dari 20 sampel fortifikasi yang diuji Garam terdapat 3 sampel yang TMS KIO<sub>3</sub>, yang mana ketiganya merupakan produk lokal garam curah Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.

Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Hasil realisasi tahun 2022 adalah 76.67 % dimana kriterianya menjadi tidak memenuhi ekspektasi. Hal ini disebabkan masih banyak sampel fortifikasi yang TMS terutama terkait KIO<sub>3</sub> pada garam. Pada tahun ini dari 20 sampel garam, 17 MS dan 3 TMS KIO<sub>3</sub>. Target tahun ini adalah 90.0 % terkait dengan Program Stunting.

d. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk meningkatkan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh pelaku usaha. Perlu dilakukan pengawasan dan KIE yang intensif terhadap pelaku usaha terutama UMKM. Pengkategorian masalah yang dihadapi tiap UMKM yang bermasalah dapat dilakukan sehingga pengatasan permasalahan setiap UMKM sudah tepat sasaran sehingga pengawasan fortifikasi menjadi lebih efektif dan menimbulkan dampak positif terhadap pencapaian kinerja BBPOM di Banda Aceh.

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha terkait fortifikasi, rutin membangun komunikasi. Memberikan pelatihan terkait pangan fortifikasi dengan mendatangkan tenaga ahli jika dibutuhkan. Memetakan daerah dan

pelanggaran yang umumnya terjadi di daerah tersebut sehingga dapat dibuat strategi pengatasan masalah bisa lebih efektif.

*Tabel 22. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I*

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala	Sudah dilakukan peningkatan pencapaian kinerja secara berkala dengan konsisten melalui rapat evaluasi triwulanan		14 April 2023

### Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh

Sasaran Strategis 2 tidak dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja di Triwulan.

#### Indikator Kinerja

#### 6. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh

##### a. Perbandingan Target Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023

*Tabel 23. Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness Indeks*) terhadap Obat dan Makanan aman dan Bermutu*

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing -	-	-	-	-

masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh				
---	--	--	--	--

Pengukuran dilakukan melalui survei kepada masyarakat di 34 Provinsi dengan desain metodologi *sampling* dua tahap berstrata (*stratified two stage sampling*) dengan jumlah perkiraan rumah tangga di setiap provinsi dan strata urban/rural yang merepresentasikan indeks secara Nasional dan Provinsi serta menggambarkan kondisi *real* di lapangan. Responden dalam survei ini adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan yang merupakan lingkup pengawasan BPOM yang berusia 17- 65 tahun serta sehat jasmani dan rohani. Pengembangan metode dan desain sampel dilakukan bersama Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik (BPS). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur melalui wawancara tatap muka dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yang berbasis *offline* dan *online* yang dapat dimonitor secara *real-time* melalui *dashboard monitoring* pada: <https://surveiskkm.pom.go.id>

Indeks Kesadaran Masyarakat disusun melalui tiga aspek pembentuk yaitu:

1. **Pengetahuan (Knowledge)** bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
2. **Sikap (Attitude)** untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu.
3. **Perilaku (Practices)** untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa. Indeks Kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan, yaitu jaminan keamanan, upaya pengawasan, upaya perlindungan dan pemberian informasi, serta

tindakan BPOM. Indeks Kesadaran dan Kepuasan yang digunakan yaitu skala 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

Kategori	Skala
Tidak Baik / Tidak Puas	≤ 45,00
Kurang Baik / Kurang Puas	45,01 – 60,00
Cukup Baik / Cukup Puas	60,01 – 75,00
Baik / Puas	75,01 – 90,00
Sangat Baik / Sangat Puas	≥ 90,01

Sampai dengan TW 1 tahun 2023 belum dapat diperoleh indeks kesadaran masyarakat, karena pengambilan data survey baru akan dilakukan pengukuran pada triwulan III dan IV tahun 2023.

**b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2023**

*Tabel.24 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Triwulan 1 Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness Indeks) terhadap Obat dan Makanan aman dan Bermutu*

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi 2021	% Capaian	Kriteria
Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Balai Besar POM di Banda Aceh	81	-	-	

Pengukuran belum bisa dilakukan untuk Triwulan I karena masih dalam tahap pengumpulan dan update data oleh Pusat Analisis dan Kebijakan Obat Makanan Badan POM RI.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Berdasarkan hasil survei tahun 2022 Jumlah responden pada survei pengukuran tingkat kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan adalah sebanyak 540 responden. Masing-masing aspek pembentuk Indeks Kesadaran Masyarakat yang diperoleh adalah **aspek sikap masyarakat sebesar 86,44 dengan kategori Baik, aspek pengetahuan masyarakat sebesar 81,95 dengan**

**kategori Baik, dan aspek perilaku masyarakat diperoleh sebesar 69,68 dengan kategori Cukup Baik.** Dari ketiga aspek Indeks Kesadaran Masyarakat, diketahui bahwa aspek sikap masyarakat merupakan aspek tertinggi dan terendah berasal dari perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik dalam memilih obat dan makanan yang aman, namun belum diikuti dengan perilaku yang baik untuk kehidupan sehari-hari dalam memilih Obat dan Makanan aman dan bermutu.

Berdasarkan pesan kunci KLIK dapat disimpulkan bahwa variable pada aspek pengetahuan dan sikap, variable tertinggi yakni terkait kedaluarsa dan yang perlu upaya peningkatan adalah nomor izin edar. Sementara untuk aspek perilaku, variable tertinggi adalah memilih produk dengan kemasan yang baik dan yang perlu ditingkatkan adalah membaca informasi pada label.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Layanan Informasi, dan Edukasi (KIE), Berkolaborasi dalam upaya mempublikasikan program BPOM dan mendiseminasikan materi terkait keamanan Obat dan Makanan, antara lain melalui TV dan radio lokal, Bekerjasama dalam memberdayakan masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan, diantaranya melalui pergerakan Posyandu, Menggencarkan promosi penggunaan tagline cek KLIK, Kata BPOM dan BPOM Mobile melalui berbagai media.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Di dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan, diantaranya dengan cara:

- Meningkatkan sinergi dengan kementerian/lembaga, terutama di daerah rural seperti camat dan perangkat desa.

- meningkatkan strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan, lebih menyoar ke perguruan tinggi.
- Menyusun konten/materi informasi dan edukasi untk meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan masyarakat, terutama konten di medsos dengan update berita terkini seputar pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM.

Peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Layanan Informasi, dan Edukasi (KIE), Berkolaborasi dalam upaya mempublikasikan program BPOM dan mendiseminasikan materi terkait keamanan Obat dan Makanan, antara lain melalui TV dan radio lokal, Bekerjasama dalam memberdayakan masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan, diantaranya melalui pergerakan Posyandu, Menggencarkan promosi penggunaan tagline cek KLIK, Kata BPOM dan BPOM Mobile melalui berbagai media.

Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.

#### e. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Kegiatan KIE dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	On proses	KIE tentang P4GN dan Cek KLIK dan BPOM Mobile cetak dan media sosial	Hingga akhir 2023
2.	Berkolaborasi dalam upaya mempublikasikan program BPOM dan mendesiminasikan materi terkait keamanan pangan	On Process	Publikasi melalui, TV Radio lokal	Hingga akhir tahun

### Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing - masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh

Sasaran Strategis 3 tidak dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja di Triwulan I

#### Indikator Kinerja

#### 7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

##### a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I

Tabel. 26 Target dan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target 2022 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-%	-%	-%	-

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BBPOM di Banda Aceh. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/*coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD) kepada pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan.

Aspek pengukuran dalam survey ini adalah :

- Aspek bimbingan dan pembinaan.
- Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan.

- Aspek penanganan saran dan masukan.
- Aspek manfaat.
- Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.
- Aspek pengetahuan dan pemahaman.

Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri. Hingga triwulan I tahun 2023 belum diperoleh hasil pengukuran Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan.

b. **Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023**

*Tabel 27. Perbandingan Realisasi dan capaian Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan dengan. Target renstra 2024*

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi Triwulan I	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	93.40 %	-	-	-

Belum ada realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan hingga triwulan I tahun 2023 sehingga belum dapat dibandingkan.

c. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan pada Triwulan I yang dilakukan terhadap 6 responden dengan 1 kegiatan bimbingan dan pendampingan sudah mencapai target yang ditetapkan. Capaian indeks kepuasan pelaku usaha pada triwulan I tahun 2023 ini diperoleh dari 1 (satu) Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan (KBP). Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan (KBP) terhadap pelaku usaha yang dilakukan yaitu :

Bimbingan Teknis ( Bimtek ) kepada Pelaku Usaha Kosmetika Balai Besar Pom Di Banda Aceh Tahun 2023

Dari kegiatan tersebut, telah dilakukan survei Kepuasan Masyarakat menggunakan system IKEPU (Indeks Kepuasan Pelaku Usaha) sesuai arahan dari PAKOM untuk menilai kepuasan pelaku usaha terhadap layanan public petugas BBPOM di Banda Aceh terkait konsultasi registrasi obat tradisional, kosmetik dan pangan serta sosialisasi. Hasil survei yang diperoleh sementara pada TW I tahun 2023 memenuhi ekspektasi

Untuk terus dapat meningkatkan realisasi indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan diperlukan beberapa upaya antara lain:

- Meningkatkan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut atas hasil survei maupun hasil pengukuran indeks.
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan petugas BPOM terkait pendaftaran agar proses dapat lebih cepat.
- Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan.
- Menyediakan format – format dokumen terkait CPOTB, CPKB dan CPPOB agar pelaku usaha lebih mudah dalam mempersiapkan dokumen.

d. Analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa program yang mendukung pencapaian indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yaitu :

1. Peningkatan dalam strategi survei yaitu dengan meningkatkan koordinasi dengan responden dan meningkatkan response rate

2. Pendalaman dalam karakteristik responden atau pelaku usaha yaitu pemastian pemahaman responden terhadap pertanyaan survei dan pemetaan kendala non teknis dan teknis dalam survei
  3. Perencanaan KBP yang lebih matang mulai dari identifikasi kendala KBP sebelumnya, pendataan keluhan pelaku usaha terhadap KBP yang dilakukan, gambaran pelaksanaan KBP yang lebih terperinci
  4. Pemantapan posisi PIC yang lebih baik mulai dari pemahaman PIC terhadap pengukuran indeks pelaku usaha, SK dan penugasan PIC
- e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Matriks Tindak lanjut Rekomendasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 28. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan**

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Monev berkala tindak lanjut atas hasil survey		Monev pada aplikasi laporan periodik	Triwulan II tahun 2023
2.	Menindaklanjuti saran dan masukan responden		Pendataan disertai saluran komunikasi aktif	Triwulan II tahun 2023
3.	Koordinasi dan komunikasi aktif dengan Petugas BPOM Pusat	Melalui saluran komunikasi aktif	-	-

## 8. Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

- a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I

**Tabel 29. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi TW I (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu:

1. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
  2. Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat yang mengacu pada proses pengawasan obat dan makanan meliputi :
    - a. Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BBPOM di Banda Aceh terhadap produk Obat dan Makanan, seperti Intensifikasi pangan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, Intensifikasi Hari Natal dan Tahun Baru, serta kegiatan rutin pengawasan obat dan makanan;
    - b. Kemampuan BBPOM di Banda Aceh dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan;
    - c. Jaminan yang diberikan oleh BBPOM di Banda Aceh terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran;
    - d. TindakanBBPOM di Banda Aceh atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat
- Hingga triwulan I tahun 2023, belum diperoleh hasil pengukuran Indeks kepuasan

masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan.

**b. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I dengan Target 2023**

**Tabel 30. Perbandingan Realisasi dan capaian Indeks Kepuasan kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan dengan. Target renstra 2023**

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TW I	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	73.62 %	-	-	

Belum terdapat realisasi Indeks Kepuasan kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan Triwulan I tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2023.

**c. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

- a. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan diukur baik secara langsung maupun tidak langsung. Indeks kepuasan yang diukur secara langsung yaitu sejauh mana kinerja BBPOM di Banda Aceh dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan melalui fasilitas website dan media social (tangibles).
- b. Komunikasi, Informasi, Edukasi kepada masyarakat telah dilakukan BBPOM di Banda Aceh melalui kegiatan tatap muka secara langsung, media social (WhatsApp, website, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube dan sms blast), media cetak (media koran lokal) dan media elektronik (televisi and radio). Selama Triwulan I BBPOM di Banda Aceh melakukan pemberian informasi sesuai permintaan *stake holder*, seperti topic terkait Keamanan pangan di bulan Ramadhan serta Tata Cara Registrasi Pangan Olahan yang Baik, serta informasi terkait pangan olahan siap saji menggunakan Liquid Nitrogen (Chikibul).

- c. Website BBPOM di Banda Aceh juga terus ditingkatkan tampilan dan informasinya agar dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait obat dan makanan. Media social resmi BBPOM di Banda Aceh juga menjadi pelengkap sebagai sumber informasi yang mudah diakses bagi masyarakat. Tampilan dan informasi yang disampaikan melalui media social dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama terkait isu – isu terkini yang terjadi di masyarakat dan mencegah adanya informasi sampah/hoaks yang beredar. Adanya Agent of change yang terdiri dari kelompok milenial menjadi harapan bagi BBPOM di Banda Aceh agar mampu membuat desain serta tampilan informasi di media social yang sederhana, menarik, informatif dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Layanan email maupun WhatsApp juga dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut.
- d. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang kedua yaitu melalui pengukuran indicator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BBPOM di Banda Aceh dalam melakukan pengawasan (reliability), tindakan (responsiveness), memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (empathy) terhadap obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Berbagai kegiatan-kegiatan telah dilakukan seperti Intensifikasi Pengawasan Pangan pada hari besar keagamaan, kegiatan talkshow, serta pengawasan monitoring terkait produk pangan siap saji menggunakan Liquid Nitrogen (Chikibul) merupakan aspek – aspek yang mendukung indicator ini.
- e. Untuk terus dapat meningkatkan capaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan, maka perlu dilakukan hal-hal antara lain:
- Meningkatkan publikasi berbagai kegiatan BPOM yang bersentuhan dengan masyarakat seperti aksi kosmetik illegal, intensifikasi pangan, dan lainnya.
  - Meningkatkan intensifikasi KIE kepada masyarakat serta penyediaan layanan dengan pemanfaatan media social secara maksimal seperti tagline CEK KLIK, BPOM Mobile, Kata BPOM, Halo BPOM, website, dan alamat media social BBPOM di Banda Aceh
  - Meningkatkan konsistensi dalam memberikan informasi kepada masyarakat baik melalui website dan juga media social.

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan agar menunjang pencapaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan antara lain;

1. Pembaharuan data sarana dan produk yang akan diawasi, serta merencanakan kegiatan pada awal tahun secara proporsional dalam mengawasi semua produk Obat dan Makanan.
2. Monitoring dan evaluasi hasil kegiatan setiap akhir bulan agar dapat mengambil langkah - langkah yang tepat pada kegiatan bulan berikutnya hingga akhir tahun.
3. Melibatkan Lintas Sektor dalam pengawasan obat dan makanan yang lebih optimal.
4. Melibatkan media massa seperti media cetak dan televisi untuk membantu menyebarkan informasi hasil pengawasan seperti aksi pemberantasan komestik illegal, kegiatan instensifikasi pangan hari besar keagamaan, dan lainnya.
5. Melibatkan anggota Satuan Karya Pramuka POM untuk membantu BPOM dalam melakukan pengawasan dan pemberian informasi ke masyarakat terkait kinerja BPOM.

Pemanfaatan media sosial sebagai indikator langsung sangat memegang peranan penting, pemilihan topik yang lebih menarik bagi masyarakat harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Selama Triwulan I beberapa topik yang ditampilkan pada media social seperti terkait pangan siap saji Chikibul, serta pemberitaan intensif pelaksanaan Pengawasan Rutin Khusus Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1444 H.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Monev berkala tindak lanjut atas hasil survey		Monev aktif	Triwulan II
2.	Pengaktifan Satuan Karya Pramuka POM		Pemberitaan intens terkait SAKA POM	Triwulan II
3.	Pemanfaatan media social yang optimal terkait isu terkini seperti GGL, Chikibul, Hasil Pengawasan Rutin Khusus Ramadhan 1444H	Sosialisasi di Medsos		

## 9. Indeks Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Besar POM di Banda Aceh

### a. Perbandingan Target Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2023

*Tabel 31. Perbandingan Target Triwulan 1 dan Realisasi Triwulan 1 Indeks Pelayanan Publik di lingkungan Balai besar POM di Banda Aceh*

Indikator Kinerja	Target Triwulan 1	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik di lingkungan Balai Besar POM di Banda Aceh	-	-	-	-

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM melalui aplikasi SAPA APiP (Saat ini

PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), target dinyatakan dalam angka. Semua indikator dari sasaran kegiatan meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh ini diukur pada akhir tahun 2023.

Kategori	Skala
Tidak Baik/Tidak Puas	≤ 45,00
Kurang Baik / Kurang Puas	45,01 – 60,00
Cukup Baik / Cukup Puas	60,01 – 75,00
Baik / Puas	75,01 – 90,00
Sangat Baik / Sangat Puas	≥ 90,01

Belum ada dilakukan survey untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan public pada triwulan I, hal ini karena pada tahun 2023 dikelola oleh Biro Hukor Badan POM, berbeda pada tahun sebelumnya oleh Inspektorat.

**b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2023**

**Tabel 32. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Triwulan 1 Indeks Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Besar POM di Banda Aceh**

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan 1	% Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik di lingkungan Balai Besar POM di Banda Aceh	93	-	-	-

Belum dilakukan survey untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat pada triwulan I, sehingga data Indeks Kepuasan Masyarakat belum ada realisasi.

**c. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Hasil survey tahun 2022 terjadi penurunan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik, hal ini menjadi perhatian hingga dilakukan evaluasi dan beberapa hal yang menjadi prioritas agar bisa meningkatkan nilai indeks. Beberapa

hal yang akan dilakukan adalah dengan pemilihan responden yang benar benar telah mendapatkan layanan pendampingan secara tuntas, terhadap layanan permintaan informasi maupun pemenuhan rekomendasi dalam rangka izin edar. Di samping itu diperlukan rewiuw renstra untuk penurunan target capaian indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM.

**d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja**

Balai Besar POM di Banda Aceh akan terus beupaya untuk memperbaiki kinerja kedepannya, sebagai berikut:

- Pendampingan UMKM melalui inovasi elearning korporasi, program spesifik daerah seperti inovasi Sanger Ureueng Aceh dan publikasi terkait PNBPN, hasil pengawasan yang update pada media social maupun SIPPN serta pemenuhan sarana prasarana diyakini menunjang keberhasilan untuk meningkatkan nilai kepuasan masyarakat di Balai Besar POM di Banda Aceh
- Peningkatan kompetensi petugas layanan.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pendampingan UMKM melalui inovasi	On proses	Publikasi PNBPN dan pendampingan memlaui inivasi e-korporasi	hingga akhir tahun
2.	Peningkatan Kompetensi Petugas Layanan	On proses	Pelatih untuk petugas Layanan	hingga akhir tahun

#### Sasaran Strategis 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh

Sasaran Strategis 4 dicapai dengan NPS 94.47% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi

#### Indikator Kinerja

#### 10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

##### a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I

Hingga Triwulan I tahun 2023, capaian persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 33. Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target TWI 2023 (%)	Realisasi TW I(%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Keputusan/Rekomendasi hasil Inspeksi yang dimaksud pada indikator kinerja ini adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh pelaku usaha di sarana produksi dan distribusi di bidang obat dan makanan. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil Pemeriksaan sarana (sarana produksi obat dan makanan, sarana distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan, hasil pengawasan label, penanganan kasus, serta pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang

dilaksanakan terdiri dari:

- a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
- b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
- c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain.
- d. Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian, Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan).

Tercapainya target indikator persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dikarenakan surat rekomendasi / keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT, rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat serta rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait selama triwulan I tahun 2023 telah dilaksanakan seluruhnya oleh Balai Besar POM di Banda Aceh.

Balai Besar POM di Banda Aceh telah melaksanakan keputusan/rekomendasi sebanyak 54 keputusan /rekomendasi dari 54 keputusan/rekomendasi yang diterbitkan maupun yang diterima. Persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan selama Triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2023 dibandingkan dengan target yaitu sebesar 100%. Capaian ini telah mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria "Memenuhi ekspektasi / efektif".

#### **b. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan 1 dengan target tahun 2023**

**Tabel 34. Perbandingan Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan I dengan target tahun 2023.**

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi TW I (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	<b>Memenuhi Ekspektasi/ Efektif</b>

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2023 telah mencapai target untuk tahun 2023 dengan capaian Memenuhi Ekspektasi / Efektif. Untuk dapat mempertahankan capaian yang diteloh dicapai sangat diperlukan kerjasama dan komitmen bersama semua unit terkait.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Berdasarkan hasil realisasi dan capaian keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan selama Triwulan I sudah mencapai target yang ditetapkan untuk target Triwulan I tahun 2023. Rekomendasi terbanyak yang ditindaklanjuti yaitu keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT dan telah dilaksanakan oleh UPT berupa surat sanksi administratif sebanyak 84 rekomendasi. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan pusat dan ditindaklanjuti BBPOM di Banda Aceh seperti surat pelaporan hasil pengawasan sarana dan produk sudah ditindaklanjuti seluruhnya sebanyak 17 rekomendasi. Hal ini menunjukkan semakin baiknya kinerja dan respon Balai Besar POM di Banda Aceh dalam menindaklanjuti serta menangani rekomendasi baik yang diterbitkan oleh BBPOM di Banda Aceh, Pusat, UPT lain maupun Lintas Sektor serta dalam respon cepat terkait isu – isu terkini pengawasan obat dan makanan di daerah. Koordinasi dan komunikasi yang semakin baik dengan pihak-pihak terkait serta pengelolaan administrasi

rekomendasi internal BBPOM di Banda Aceh telah dikelola dengan baik dengan adanya penetapan timeline penerbitan tindak lanjut sebagai bentuk percepatan tindak lanjut. Respon tindak lanjut terhadap hasil pengawasan pusat yang dengan segera ditindak lanjutipun menunjukkan semakin baiknya tata hubungan kerja antar Balai Besar POM di Banda Aceh dengan Pusat, serta rekomendasi dari lintas sektor maupun pemangku kepentingan terkait obat dan makanan yang ditindak lanjuti segera merupakan respon aktif Balai Besar POM di Banda Aceh dalam mengatasi dan mengelola isu – isu maupun permasalahan obat dan makanan yang terjadi khususnya permasalahan khusus di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh.

Untuk dapat terus mempertahankan dan meningkatkan capaian persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.
2. Koordinasi aktif dan intensif melalui saluran komunikasi yang ada antara BBPOM di Banda Aceh dengan pusat dan dengan UPT lain.
3. Melakukan koordinasi dan komunikasi aktif dengan lintas sektor/pemangku kepentingan di Propinsi Aceh terkait isu dan permasalahan obat dan makanan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator persentase kinerja keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan yaitu:

- Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.
- Koordinasi dan komunikasi aktif dengan Pusat/UPT/pemangku kepentingan lainnya baik formal maupun non formal.
- Pemeriksaan sarana produksi / distribusi / pelayanan obat dan makanan serta

pemeriksaan bersama dengan lintas sektor/pemangku kepentingan terkait obat dan makanan.

- Pemantauan produk obat dan makanan melalui sampling, pengawasan penandaan, pengawasan periklanan dan pemantauan produk public warning, recall dan produk terkait isu – isu yang beredar di masyarakat.
- Peningkatan kompetensi teknis maupun non teknis bagi petugas.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Matriks Tindak lanjut Rekomendasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 35. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi**

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Monev berkala tindak lanjut sesuai timeline		Monef aktif	Triwulan II
2.	Koordinasi aktif dengan Pusat / UPT lain	Seluruh surat pusat TW I sudah di Tindak lanjut		
3.	Koordinasi dan komunikasi aktif dengan lintas sektor/pemangku kepentingan	Seluruh surat lintas sector TW I sudah di Tindak lanjut		

**11. Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I

Pada Triwulan I tahun 2023, capaian persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebagai berikut

**Tabel 36. Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**

Indikator Kinerja	Target TWI 2023(%)	Realisasi TW I (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	69.92	112.77	<b>Memenuhi Ekspektasi/ Efektif</b>

Keputusan / rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diterbitkan oleh BBPOM di Banda Aceh kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan maupun yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku Kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan antara lain pelaku usaha dan lintas sector (pemerintah daerah, kementerian, Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan). Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil Pemeriksaan sarana (sarana produksi obat dan makanan, sarana distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan, hasil pengawasan label, penanganan kasus, serta pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari pemangku kepentingan terkait terhadap keputusan / rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terdiri dari:

1. Keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha
2. Keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dari perhitungan:

% Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku

$$\text{Kepentingan} = (A + B) / 2$$

A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%.

Pada Triwulan I tahun 2023 Balai Besar POM di Banda Aceh telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh kepada pelaku usaha dan lintas sector sebanyak 84 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, sebanyak 57 pelaku usaha memberikan respon/feedback. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan selama Triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar 69.92%. Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan pada triwulan I tahun 2023 dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar 112,77 % dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi/ Efektif.

#### b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan target tahun 2023

*Table 37. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan*

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TW I %	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	69.92	112.77	<b>Memenuhi Ekspektasi/ Efektif</b>

Realisasi persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada Triwulan I tahun 2023 sudah mencapai target renstra tahun 2023 dengan capaian memenuhi ekspektasi / efektif. Walaupun demikian, masih diperlukan peningkatan upaya yang lebih efektif dan berkesinambungan agar realisasi kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk mencapai target tahun 2023.

#### c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

### kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada Triwulan I tahun 2023 sudah mencapai target. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan secara perlahan semakin meningkat dimana koordinasi dan komunikasi aktif terus dilakukan untuk percepatan respon tindak lanjut dari pelaku usaha dan lintas sektor.

Keputusan / Rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan ini masih belum maksimal dikarenakan masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam menindaklanjuti secara dminitrasi terhadap rekomendasi yang diterbitkan Balai Besar POM di Banda Aceh, serta masih kurangnya komitmen dari linsek sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan.

Untuk dapat terus meningkatkan capaian terhadap indicator keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sesuai target yang ditetapkan, masih diperlukan beberapa upaya perbaikan dan langkah strategis secara berkesinambungan untuk meningkatkan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan khususnya pelaku usaha sarana produksi dan distribusi sarana pelayanan kefarmasian antara lain :

- Pembinaan teknis kepada pelaku usaha terkait pembuatan CAPA sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diterbitkan oleh BBPOM di Banda Aceh
- Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan produk maupun sarana obat dan makanan serta penanganan isu dan permasalahan yang terjadi di daerah.
- Monitoring dan evaluasi yang lebih efektif terhadap kontrol respon tindak lanjut pelaku usaha terhadap rekomendasi yang diterbitkan.

#### d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan- kegiatan yang telah dilakukan selama Triwulan I tahun 2023 yang mendukung pencapaian kinerja ini antara lain:

- a. Pembuatan tindak lanjut berupa CAPA langsung ditempat oleh sarana khususnya sarana distribusi obat tradisional, kosmetik dan pangan sebagai tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan.
  - b. Memfasilitasi pelaku usaha melalui link google drive untuk mempermudah tahapan penyelesaian CAPA dimana bukti perbaikan dapat diunduh di link tersebut dan dilakukan bertahap sampai dinyatakan CAPA selesai. Hal ini untuk mengurangi terjadinya pemberian surat administrative berulang – ulang ke pelaku usaha.
  - c. Sosialisasi langsung ke pelaku usaha saat pemeriksaan sarana oleh petugas BBPOM di Banda Aceh untuk memberikan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang diterbitkan.
  - d. Advokasi dan koordinasi yang berkesinambungan dengan lintas sektor untuk meningkatkan komitmen dalam efektivitas pengawasan obat dan makanan
  - e. Komunikasi aktif dan intensif dengan lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan baik secara formal maupun informal.
- e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Matriks Tindak lanjut Rekomendasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 38. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Merencanakan pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha di sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian		Bimtek CDOB / Saryanfar	Triwulan II

2.	Pembinaan teknis kepada pelaku usaha terkait tindak lanjut CAPA		Pembinaan saat inspeksi	Triwulan II
3.	Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor		Komunikasi Aktif formal/informal	Triwulan II

## 12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

### a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I

*Table 39. Persentase keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu*

Indikator Kinerja	Target Triwulan 1 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	<b>Memenuhi Ekspektasi/Efektif</b>

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Yang dimaksud **tepat waktu** adalah **tidak melewati *timeline*** yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. karena seluruh sampel pengujian pihak ketiga dan rekomendasi keputusan sertifikasi lainnya seluruhnya telah diselesaikan / dikeluarkan sesuai dengan ketentuan timeline masing - masing layanan.

### b. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I dengan target 2023

*Tabel 40. Perbandingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan I dengan target 2023*

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi Triwulan I	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100%	100%	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan I tahun 2023 sudah mencapai target tahun 2023. Walaupun demikian masih diperlukan upaya untuk mempertahankan realisasi agar capaian target tahun 2023 tetap tercapai.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keputusan sertifikasi didominasi oleh layanan penerbitan sertifikat pengujian sampel pihak ketiga sebanyak 39 sertifikat (86,67%) dan sisanya 6 rekomendasi (13,33%) adalah layanan sertifikasi lainnya. Loka POM Aceh Tengah dan Loka POM Aceh Selatan tidak melakukan pengujian sampel pihak ketiga sehingga layanan pengujian sampel yang dilakukan di Balai Besar POM di Banda Aceh tidak termasuk untuk wilayah kerja Loka Aceh Tengah dan Loka Aceh Selatan. Layanan pengujian sampel terdiri dari 39 sampel pihak ke 3.

Penyelesaian 39 sertifikat sampel pengujian dapat dilakukan tepat waktu didukung dengan komitmen laboratorium pengujian Balai Besar POM di Banda Aceh yaitu dengan memangkas *timeline* pengujian sampel barang bukti tindak pidana narkoba dari 10 HK menjadi 2 HK saja. Sedangkan untuk pengujian sampel selain barang bukti tindak pidana narkoba dapat terpenuhi dengan dukungan peningkatan kompetensi dan efisiensi SDM di laboratorium BBPOM di Banda Aceh. Sementara itu sebanyak 6 keputusan sertifikasi lainnya yang dapat diselesaikan sesuai timeline layanan dapat tercapai dengan didukung pelaksanaan bimbingan teknis yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan registrasi; adanya *desk-konsultasi*

registrasi dan *desk-CAPA (Corrective Action Preventive Action)* atas temuan audit yang dilakukan.

Sebagai implementasi Undang- Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya menyebabkan adanya penyesuaian dalam penerbitan proses perizinan yaitu proses perizinan awal dimulai dari aplikasi OSS (*Online Single Submission*). Oleh karena itu, BBPOM di Banda Aceh berupaya meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan SKPD terkait lainnya agar terdapat kesamaan persepsi antar petugas sehingga mampu memberikan informasi yang tepat dalam setiap tahapan perizinan.

Meskipun sudah mencapai target, masih diperlukan upaya untuk mempertahankan kinerja agar tetap mencapai target yang ditetapkan secara maksimal, antara lain dengan:

- a. Koordinasi dengan lintas sektor dan Inkubator Bisnis di Perguruan Tinggi untuk pengembangan serta memberikan stimulus kepada UMKM agar target UMKM mendapatkan manfaat seperti pengembangan jaringan distribusi dan permodalan
- b. Melakukan program desk CAPA secara berkesinambungan dan terprogram secara onsite maupun daring, termasuk yang dilakukan secara individu oleh masing-masing auditor Adapun sasaran desk CAPA adalah sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian CAPA.
- c. Meningkatkan kompetensi dan penyamaan persepsi serta *sharing knowledge* antara petugas di SubKelompok Substansi Sertifikasi dan Kelompok Substansi Infokom.
- d. Memperkuat sosialisasi tentang pentingnya mutu dan keamanan produk secara *online* dengan penerapan Cara Produksi dan Distribusi yang Baik.
- e. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Koorporasi melalui Sistem terintegrasi dalam fasilitasi UMKM sehingga mempercepat proses fasilitasi UMKM
- f. Memperkuat layanan prima dalam pendampingan e-sertifikasi untuk produk pangan, kosmetika dan Obat Tradisional.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/ kegiatan yang mendukung tercapainya target. Jumlah Keputusan Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2022 yaitu:

1. Peningkatan kompetensi petugas layanan Sertifikasi secara daring untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pendampingan pelaku usaha. Pelatihan yang diikuti oleh petugas yaitu pelatihan fasilitator pangan, kosmetik dan OTSK, pelatihan inspektur kosmetik, sosialisasi dan bimtek terkait registrasi pangan olahan berbasis resiko, sosialisasi dan bimtek tentang penerapan SMKPO, dan pelatihan lainnya yang terkait dengan perizinan pangan dan OTSK.
2. Penambahan alat laboratorium, peningkatan kompetensi personil, dan penambahan ruang lingkup pengujian untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengujian pihak ketiga.
3. Pelaksanaan program “KORPORASI” (Kolaborasi Fasilitasi UMK dalam Sertifikasi dan Izin Edar) Balai Besar POM di Banda Aceh bersama OPD terkait untuk berkolaborasi memfasilitasi UMK dalam proses sertifikasi sarana dan registrasi izin edar obat tradisional, kosmetika dan pangan di Aceh guna meningkatkan pemenuhan mutu dan standar produk yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kepercayaan publik terhadap produk UMK lokal di Aceh.

Kegiatan Koorporasi meliputi:

- a. Pembentukan fasilitator sehingga dapat mempercepat proses penerbitan layanan sertifikasi karena dapat memberikan layanan konsultasi secara langsung kepada pelaku usaha. BBPOM Aceh akan melakukan rekrutmen dan melatih 1 (satu) tenaga profesional dari luar, ditugaskan melakukan pendampingan secara intensif pada pelaku usaha yang mengajukan permohonan izin penerapan CPPOB dan registrasi izin edar.
- b. Pelatihan Fasilitator Layanan Sertifikasi dan Izin Edar. Pelatihan Fasilitator akan dilaksanakan pada bulan mei tahun 2023

- c. Pendampingan yang intensif terkait denah dan sertifikasi sarana produksi. Pendampingan dilakukan secara langsung ke sarana produksi melalui kegiatan asistensi dan kepada beberapa pelaku usaha secara *on the spot* pada saat kegiatan bimbingan teknis cara produksi yang baik dengan metode *desk-consultation*
- d. Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dan Pembinaan kepada pelaku usaha yang akan mengajukan layanan sertifikasi bai secara daring maupun luring. Salah satunya yaitu akan dilaksanakan pelaksanaan Bimtek e-Reg Pangan pada bulan Juli tahu 2023.
- e. Pelayanan prima di Mall Pelayanan Publik Provinsi Aceh, Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Masyarakat bisa datang ke both BBPOM di Banda Aceh yang berada di Mall Pelayanan Publik untuk mendapatkan informasi terkait pendaftaran obat dan makanan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Matriks Tindak lanjut Rekomendasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 41. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.**

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Merekrut dan melatih tenaga fasilitator eksternal untuk mempercepat proses penerbitan layanan sertifikasi.		Rekrutmen dan pelatihan fasilator eksternal	April – Mei 2023
2.	Akan terus dilakukan program desk CAPA yang dilakukan secara terprogram, maupun yang dilakukan secara individu oleh masing-masing auditor. Mengingat keterbatasan sumber daya		Akan dilakukan desk CAPA untuk sarana kosmetik, OT dan Pangan	April – Juni 2023

	desk CAPA akan diselenggarakan secara daring. Adapun sasaran desk CAPA adalah sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian CAPA			
3.	Memperkuat sosialisasi tentang pentingnya mutu dan keamanan produk secara online dengan penerapan Cara Produksi dan Distribusi yang Baik		Petugas sertifikasi akan berkontribusi dalam memberikan layanan Jawab Netizen	April – Juni 2023
4.	Sistem terintegrasi dalam fasilitasi UMKM sehingga mempercepat proses fasilitasi UMKM (monitoring dan evaluasi pelaksanaan Koorporasi).		Layanan lanjutan dari koorporasi akan tetap dilakukan secara terus menerus yaitu pendampingan denah, pendampingan pemenuhan persyaratan izin penerapan CPPOB, pendampingan SPA SCPK dan CPOTB bertahap	April – Juni 2023
5.	Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai cara produksi olahan yang baik	➤ Telah dilakukan bimtek kepada pelaku usaha kosmetik pada Maret 2023	Akan dilakukan pelatihan/bimtek kepada pelaku usaha pangan dan pelaku usaha obat tradisional	April – Juni 2023
6.	Merekrut dan melatih tenaga fasilitator eksternal untuk mempercepat proses penerbitan layanan sertifikasi.		Rekrutmen dan pelatihan fasilitator eksternal	April – Mei 2023

### **13. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan**

#### **a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target triwulan I**

**Tabel 42. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

Indikator Kinerja	Target 2022 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	56.25	86.54	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi/ Kurang Efektif</b>

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi obat tradisional UKOT dan UMOT, sarana produksi kosmetik, sarana produksi pangan MD dan IRTP. Sarana produksi obat dan makanan. Memenuhi ketentuan yang dimaksud yaitu tidak adanya temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau hasil Pemeriksaan dengan rating A dan B untuk produksi pangan MD dan hasil rating Level I dan II untuk produksi pangan IRTP pada saat dilakukan Pemeriksaan dan tindak lanjut yang diberikan berupa pembinaan dan perintah perbaikan.

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan yaitu persentase perbandingan antara jumlah sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan target jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian analisis resiko untuk dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta penerapan cara produksi obat dan makanan yang baik konsisten dilakukan menghasilkan produk yang aman dan berkualitas.

Pemilihan sarana produksi yang ditargetkan untuk dilakukan pemeriksaan didasarkan pada kajian analisis resiko yaitu diprioritaskan pada sarana produksi dengan riwayat / track record tidak memenuhi ketentuan, adanya permintaan / laporan dari pihak luar, sarana produksi yang sudah lama tidak diperiksa dan sarana produksi baru yang belum pernah diperiksa.

Selama Triwulan I tahun 2023 sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 16 sarana produksi obat dan makanan dengan hasil pemeriksaan sebanyak 9 sarana Memenuhi Ketentuan dan sebanyak 7 sarana "Tidak Memenuhi Ketentuan." Persentase sarana

yang diperiksa yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 56.25%. Capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dibandingkan dengan target Triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar 86.54% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi sesuai target yang ditetapkan dengan kesimpulan efektivitas yaitu kurang efektif.

**b. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2023**

**Tabel 43. Perbandingan Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan I dengan target 2023**

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	65	56.25	86.54	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi/ Kurang Efektif</b>

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi obat tradisional UKOT dan UMOT, sarana produksi kosmetik, sarana produksi pangan MD dan IRTP. Sarana produksi obat dan makanan. Memenuhi ketentuan yang dimaksud yaitu tidak adanya temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau hasil Pemeriksaan dengan rating A dan B untuk produksi pangan MD dan hasil rating Level I dan II untuk produksi pangan IRTP pada saat dilakukan Pemeriksaan dan tindak lanjut yang diberikan berupa pembinaan dan perintah perbaikan.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Realisasi sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan belum mencapai target yang ditetapkan. Pemeriksaan sarana produksi yang paling banyak dilakukan pemeriksaan didominasi oleh sarana produksi industri pangan, dari sebanyak 14 sarana industri pangan yang diperiksa, hanya sebanyak 7 sarana yang memenuhi ketentuan terutama sarana produksi pangan olahan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) terkait dengan hasil uji laboratorium produk jadi AMDK tersebut yang Tidak Memenuhi Syarat terutama parameter angka Coliform. Hal ini

disebabkan masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan komitmen dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik agar menghasilkan produk yang aman dan berkualitas terutama terkait hygiene dan sanitasi produksi makanan.

Untuk sarana produksi usaha mikro obat tradisional dan industri kosmetik sudah memenuhi ketentuan untuk semua sarana yang diperiksa. Hal ini disebabkan sudah semakin meningkatnya kesadaran pelaku usaha serta pembinaan intensif yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh.

Untuk dapat meningkatkan capaian target sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Banda Aceh berkomitmen memaksimalkan pengawasan terhadap sarana produksi obat dan makanan sebagai berikut:

- Pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif kepada pelaku usaha agar melaksanakan proses produksi sesuai ketentuan dan cara produksi obat dan makanan yang baik.
- Pemberian sanksi administrasi sesuai peraturan yang berlaku kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.
- Monitoring dan evaluasi sarana produksi obat dan makanan yang lebih aktif untuk penetapan prioritas pengawasan sarana produksi obat dan makanan dan meminimalkan permasalahan yang mungkin ditimbulkan.

#### d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja yaitu:

- Pemeriksaan dan pendampingan sarana produksi obat dan makanan intensif secara luring dengan tetap menerapkan protocol kesehatan.
- Mensosialisasikan kepada pelaku usaha terkait kegiatan yang diadakan BPOM terutama secara daring terkait Cara Produksi Obat dan Makanan yang Baik untuk dapat menghasilkan produk obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- Layanan konsultasi *offline* maupun *online* dengan petugas yang kompeten untuk pendampingan bagi pelaku usahah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

- Monitoring dan evaluasi terhadap hasil CAPA sarana produksi untuk memastikan sarana telah melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Matriks Tindak lanjut Rekomendasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 44. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan**

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pembinaan teknis kepada pelaku usaha terkait CPPOB		Pembi naan saat inspek si	Tri w ul an II
2.	Pemberian sanksi administrasi sesuai peraturan		Penerapan sanksi sesuai	Triwulan II
3.	Peningkatan pengawasan sarana produksi berdasarkan analisis resiko		Monev analisis resiko sarana	Triwulan II
4	Monitoring dan evaluasi CAPA yang efektif		Monev aktif	Triwulan II

**14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Aceh**

a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I

*Tabel 45. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan*

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi TW I (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82	84.93	103.97	<b>Memenuhi Ekspektasi/Efektif</b>

Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan adalah persentase perbandingan jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan / target jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa.

Target persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Banda Aceh yaitu sebesar 80%. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, sarana pelayanan kefarmasian (Instansi Farmasi RS, apotek, klinik, dan toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa ditetapkan berdasarkan kajian analisis resiko dan penetapan kesimpulan sarana apakah Memenuhi Ketentuan atau Tidak memenuhi ketentuan mengacu pada:

1. Pedoman Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat.
2. Pedoman Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK.
3. Pedoman Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan.
4. Petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan fasilitas distribusi Obat / bahan Obat dan Fasilitas pelayanan kefarmasian.

Pada Triwulan I tahun 2023, telah dilakukan Pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan sebanyak 272 sarana diperiksa dari target 896 sarana dengan hasil sebanyak 231 sarana Memenuhi Ketentuan dan 41 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang Memenuhi Ketentuan yaitu sebesar 84.93%. Capaian persentase sarana distribusi obat dan

makanan dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk Triwulan I tahun 2023 sudah tercapai yaitu sebesar 103.97% dengan kriteria memenuhi ekspektasi dengan kesimpulan efektivitas yaitu efektif.

**b. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023**

**Tabel 46. Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan target tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	82	84.93	103.97	<b>Memenuhi Ekspektasi/Efektif</b>

Realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan I tahun 2023 sudah mencapai target 2023 yaitu dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi / Efektif. Walaupun demikian, masih diperlukan peningkatan strategi dalam pengawasan yang lebih efektif untuk pembinaan sarana distribusi obat dan makanan agar realisasi target renstra tetap dapat dicapai dan dipertahankan.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pemilihan sarana yang akan dilakukan pemeriksaan didasarkan pada kajian analisis resiko yaitu diprioritaskan pada sarana distribusi dengan riwayat / track record tidak memenuhi ketentuan, adanya permintaan / laporan dari pihak luar, sarana yang sudah lama tidak diperiksa dan sarana baru yang belum pernah diperiksa.

Pada Triwulan I tahun 2023, pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat dan saryanfar telah dilakukan sebanyak 92 sarana dari target 360 sarana dengan hasil sebanyak 81 sarana Memenuhi ketentuan ( 88.04%) dan 11 sarana Tidak memenuhi ketentuan (11.96%). Sarana pelayanan kefarmasian yang paling banyak tidak memenuhi ketentuan yaitu klinik, dimana umumnya klinik ini melakukan

pengelolaan sediaan farmasi tetapi tidak memiliki tenaga teknis kefarmasian.

Pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan telah dilakukan terhadap 180 sarana dari target sebanyak 536 sarana dengan hasil 150 sarana Memenuhi Ketentuan (83.34%) dan 30 sarana Tidak memenuhi ketentuan (16.66%).

Pemeriksaan sarana distribusi didominasi oleh sarana distribusi kosmetik sebanyak 81 sarana dengan rincian sebanyak 58 sarana Memenuhi Ketentuan (71,60%) dan 23 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (28,40%). Hal ini disebabkan masih banyaknya sarana distribusi kosmetik yang menjual produk - produk tanpa izin edar dikarenakan tren kosmetik kekinian dan produk tanpa izin edar dari luar negeri.

Peningkatan sarana distribusi obat dan saryanfar yang memenuhi ketentuan terutama dikarenakan berkurangnya ketidaksesuaian dengan kategori kritis maupun bersifat mayor sistemik terhadap pengelolaan obat, sehingga hasil pemeriksaan bersifat pembinaan teknis maupun surat tindak lanjut dengan kategori Memenuhi Ketentuan. Pada sarana pelayanan kefarmasian, sarana yang paling banyak memenuhi ketentuan yaitu puskesmas, dimana puskesmas di wilayah Aceh sudah banyak yang memiliki Apoteker sebagai penanggung jawab farmasi di Puskesmas dan telah melakukan pengelolaan obat dengan baik.

Sarana distribusi obat dan saryanfar yang tidak memenuhi ketentuan terutama didominasi oleh klinik, dimana masih terdapat klinik yang mengelola sediaan farmasi tetapi tidak memiliki penanggungjawab farmasi.

Pada sarana distribusi obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan, meningkatnya jumlah sarana yang memenuhi ketentuan dikarenakan semakin meningkatnya kepatuhan pelaku usaha yang telah dibina sebelumnya untuk tidak mengulangi kesalahan pada pengawasan selanjutnya terutama terkait produk ilegal dan kedaluwarsa. Sarana yang paling banyak memenuhi ketentuan yaitu sarana distribusi pangan olahan. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap cara ritel pangan yang baik dengan tidak mengedarkan pangan Tanpa Izin Edar, rusak dan kedaluwarsa. Sarana distribusi yang paling banyak Tidak Memenuhi Ketentuan yaitu sarana

distribusi kosmetik, hal ini dikarenakan banyaknya sarana distribusi kosmetik yang baru ataupun belum pernah dilakukan pembinaan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh Untuk dapat terus meningkatkan dan mempertahankan capaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, akan dilakukan hal – hal sebagai berikut:

- Pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha dapat berupa bimbingan teknis seperti Bimtek CDOB, Sosialisasi peraturan terbaru maupun pembinaan langsung saat pemeriksaan sarana untuk selalu memenuhi ketentuan terkait cara distribusi obat dan makanan yang baik serta penerapan sanksi yang sesuai ketentuan.
- Peningkatan kompetensi Inspektur melalui Pendidikan dan pelatihan yang berjenjang.
- Monitoring dan evaluasi sarana produksi obat dan makanan yang lebih aktif untuk penetapan prioritas pengawasan sarana produksi obat dan makanan dan meminimalkan permasalahan yang mungkin ditimbulkan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja antara lain:

- Pembinaan teknis secara intensif kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuang yang berlaku terkait distribusi obat dan makanan.
- Pemeriksaan bersama dengan lintas sektor pada kegiatan intensifikasi pangan Ramadhan, Natal dan Tahun Baru, Aksi kosmetik ilegal, dan pemeriksaan bersama di sarana pelayanan kefarmasian.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Matriks Tindak lanjut Rekomendasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 47. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan**

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha & penerapan sanksi yang sesuai	Pembinaan intensif saat pemeriksaan , dan komunikasi aktif dengan pelaku usaha	-	-
2.	Peningkatan kompetensi inspektor berjenjang	Pelatihan terjadwal yang diikuti petugas	-	-

## 15. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banda Aceh

### a. Perbandingan Target Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2023

**Tabel 48. Perbandingan Target Triwulan 1 dan Realisasi Triwulan 1 Indeks Pelayanan Publik di Lingkungan Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh**

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banda Aceh	-	-	-	-

Indeks Pelayanan Publik di lingkungan Balai Besar POM di Banda Aceh sampai pada TW 1 belum dapat dinilai:

Indeks Pelayanan Publik (IPP) menjadi salah satu indikator prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023. Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan 6 Aspek yaitu:

1. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%).
2. Profesionalitas SDM (18%).
3. Sarana Prasarana (15%).
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%)
5. Konsultasi dan Pengaduan (15%).
6. Inovasi (7%).

Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan). Pengolahan data dilakukan dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yaitu penentuan bobot pada setiap indikator aspek penilaian dalam Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik. Pembobotan dari hasil analisis dengan metode AHP dapat digunakan untuk menentukan bobot aspek dan indikator instrumen yang digunakan dalam evaluasi kinerja pelayanan publik dikarenakan telah memenuhi kriteria yaitu nilai *Consistency Ratio* (CR) dibawah 10% dan memiliki nilai konsensus lebih dari 65%: Untuk penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik itu sendiri dilakukan melalui desk evaluation, pengisian kuesioner, observasi, dan wawancara. Pengisian kuesioner menggunakan 3 (tiga) jenis kuesioner yang akan divalidasi menggunakan teknik observasi dan wawancara, diantaranya:

1. Formulir F-01 diisi oleh unit pelayanan publik,
2. Formulir F-02 diisi oleh evaluator,
3. Formulir F-03 diisi oleh pengguna layanan.

Selanjutnya, penghitungan nilai indeks merupakan nilai komposit dari 3 formulir, dimana nilai per indikator merupakan nilai rerata formulir F01, F02, dan F03 dikali dengan bobot indikator. Setelah nilai indeks diperoleh, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan penyimpulan data yang diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) kategori:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup ( <i>Dengan Catatan</i> )
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik ( <i>Dengan Catatan</i> )
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Nilai indeks tidak hanya bertujuan untuk memberikan hasil akhir nilai semata, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan unit kerja sehingga dapat melihat mana yang sudah baik dan aspek mana yang masih membutuhkan perbaikan.

**b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2023**

**Tabel 49. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Triwulan 1 Indeks Pelayanan Publik di Lingkungan Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh**

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahunan	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pelayanan publik Balai Besar POM di Banda Aceh	4,40	-	-	-

Perbandingan target tahunan dan realisasi triwulan 1 Indeks Pelayanan Publik di Lingkungan Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh belum dapat dinilai.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator sasaran strategis Meningkatkan Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik. Dari hasil penilaian Unit Pelayanan Publik tahun 2022 yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik 4,56 bagi Balai Besar BPOM di Banda Aceh menunjukkan hasil yang sangat besar dibandingkan dengan

nilai Indeks Pelayanan Publik tahun 2021 sebesar 3,76 yang naik sangat signifikan sehingga memperoleh Predikat Pelayanan Prima.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Mengingat cepatnya perubahan dan dinamika dalam sektor publik, instrumen penilaian (*tools*) pelayanan publik IPP perlu disesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Terkait dengan sistem informasi, telah dibangun database yang terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N LAPOR). Penilaian IPP diharapkan dapat berkontribusi pada penyusunan standar pelayanan publik. Pemanfaatan ajang SINOVIK untuk mencari inovasi terbaik, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan kebijakan standar layanan yang secara berkala, yang merespon kebutuhan masyarakat. Pengembangan *knowledge management* di unit kerja, perlu dilaksanakan dengan mengedepankan mekanisme *hands-on-learning* secara daring dan luring, sehingga bermanfaat bagi pengembangan perbaikan pelayanan public.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat	On proses	Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait Penyusunan satandar pelayanan yang	TW II / TW III

			melibatkan unsur dan profesi	
2	Pemberian Reward dan Punishment Petugas Pelayanan dilakukan setiap bulan	On Proses	Penilaian Reward dan Punishment Petugas Layanan Publik, dilakukan setiap bulan dan di publish di media social Balai Besar POM di Banda Aceh	hingga akhir tahun
3	Peningkatan Fasilitas sarana dan Prasarana di ruang pelayanan publik	On proses	Renovasi toilet dan sistem antrian di ruang pelayanan publik	hingga akhir tahun

## 16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

### a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2023

**Tabel 50. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi TW I (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	35%	24.17 %	69.06%	Tidak Memenuhi Ekspektasi / Tidak Efektif

Pada Triwulan I Tahun 2023, Realisasi kinerja pada indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik belum tercapai seluruhnya untuk tiap tahapan progress pelaksanaan. Dengan demikian, capaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik berada pada kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi dengan/ Tidak Efektif”..

**Gambar. Definisi Operational Rincian Ouput UPT Balai /Balai Besar POM**

Cara Perhitungan				Jumlah UMKM yang diberikan pendampingan pada tahun berjalan. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:					
<b>Tahapan Pendampingan UMKM OT oleh UPT</b>				<b>Tahapan Pendampingan UMKM Kosmetik oleh UPT</b>					
No	Nama Kegiatan	Jadwal Tahun 2022	Keterangan	Bobot (%)	No	Nama Kegiatan Pendampingan	Jadwal Tahun 2022	Keterangan	Bobot (%)
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	1 Februari s.d. 28 Februari 2022	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos.	10	1	Laporan penempatan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	2 – 30 Jan	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OT/SSK	10
2.	Bimtek Pemetaan CPDIB dan Demak bagi UMKM obat tradisional	1 Maret s.d. 30 April 2022	Dit. PMPU OT, SK Kos	20	2	Bimtek setiap tahapan (demak, CPDIB, notifikasi)	1 Feb-31 Mar	Dit. PMPU OT/SSK dan UPT BPDM	40
3.	Facilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPDIB. (Pendampingan)	1 Maret s.d. 30 Oktober 2022		40	3	Pelaksanaan Pendampingan	1 Feb – 15 Nov	Setiap TW laporan pendampingan disampaikan pada Dit. PMPU OT/SSK	40
4.	Sertifikasi	1 September – 30 November 2022		20	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorek	30 Nov	Dit. PMPU OT/SSK	10
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	TW I: 30 Maret – 10 April 2022 TW II: 30 Juni – 10 Juli 2022 TW III: 30 Agustus – 10 September 2022 TW IV: 30 Desember 2022 – 10 Januari 2023	UPT, Setiap TW membuat laporan pelaksanaan pendampingan (Bimtek, progress, fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos	10	<b>Tahapan Pendampingan UMKM Pangan Olahan oleh UPT</b>				
					No	Nama Kegiatan Pendampingan	Jadwal Tahun 2022		Bobot (%)
					1	Penetapan UMK pangan olahan target	Januari-Februari		10
					2	Bimtek CPDIB	Maret-April		20
					3	Facilitasi Pendampingan	April-Oktober		40
					4	PSB	Agustus-November		20
					5	Monev dan Pelaporan	November-Desember		10

**Catatan :**

- Setiap UPT BPDM wajib melaporkan pelaksanaan setiap tahapan pendampingan tersebut
- Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh pada pencapaian kinerja, agar dikoordinasikan dengan unit teknis (CPDIB, Dit. PMPU OT/SSK)

Cara Perhitungan Dan Formula : **Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3**

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

**b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target 2023**

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79%	24.17%	30.59%	Tidak Memenuhi Ekspektasi / Tidak Efektif

Realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada triwulan I dibandingkan dengan target renstra 2023 belum mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria “Tidak Memenuhi ekspektasi”.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Selama tahun 2023, BBPOM di Banda Aceh akan melakukan layanan pendampingan terhadap 14 UMKM yang menjadi target dalam aspek pemenuhan standar dan dari 14 terdapat 1 UMKM yang telah memenuhi standar (7.14%).

Selama Periode Januari sampai Maret 2023 tahapan pendampingan UMK yang memenuhi standar untuk UMK Obat Tradisional terhadap progres capaian sebesar 12,5% terdiri dari Penetapan target UMK Obat Tradisional (10%) dan monitoring Evaluasi dan pelaporan pada TW I (2,5%), untuk UMKM Kosmetik terdiri dari Laporan penetapan calon usaha kosmetik (10%), Bimtek kepada UMK Kosmetik (40%), serta

untuk UMK Pangan telah dilakukan untuk tahapan Seleksi UMKM (10%).

Akumulasi perhitungan TW I terhadap tahapan pendampingan umkm yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan ot dan kosmetik yang baik untuk komodi obat tradisional sebesar 12,5%, komoditi kosmetik 50%, serta komoditi pangan sebesar 10%. Rata – rata progres untuk seluruh komoditi sebesar 24,17%.

Realisasi kinerja pada indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik belum tercapai seluruhnya untuk tiap tahapan progres pelaksanaan. Hal ini disebabkan progres tahapan selanjutnya akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Petugas akan meningkatkan progres capaian pada Triwulan berikutnya dan akan melaporkan tepat waktu setiap tahapan pendampingan sesuai timeline, mulai dari laporan penetapan UMKM yang didampingi, laporan pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek CPKB, bimtek CPOTB, dan bimtek izin penerapan CPPOB), laporan pelaksanaan pendampingan (termasuk fasilitasi pendampingan dan PSB pangan), serta monitoring dan evaluasi. Selain itu keberhasilan pelaksanaan pendampingan juga disebabkan oleh kompetensi petugas dan efisiensi SDM di subkelompok subtansi sertifikasi dengan bantuan fasilitator.

Strategi Untuk dapat terus meningkatkan capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD pemerintah Aceh dalam mendukung percepatan proses registrasi pada sistem terintegrasi.
- b. Pembinaan terprogram secara terus menerus kepada pelaku usaha melalui bimbingan teknis dan sosialisasi terkait perizinan pangan olahan, kosmetik dan OTSK.
- c. Pendampingan secara kerkesinambungan dalam desk CAPA (corrective action preventive action) atas hasil pemeriksaan.

d. Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program - program yang telah dilakukan selama tahun 2022 untuk mencapai realisasi maksimal pada indikator kinerja ini anatara lain:

- a. Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh, antara lain pelatihan aspek aspek CPOB dan pelatihan lainnya. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh, maka hasil pemeriksaan sarana produksi juga lebih berkualitas.
- b. Kolaborasi dengan SKPD pemerintah Aceh terkait agar terdapat persamaan persepsi petugas. Selain itu dukungan yang diperoleh akan sangat membantu mempercepat proses registrasi produk karena sistem registrasi melalui oss.rba yang mengharuskan peran aktif dari SKPD sesuai tupoksinya masing masing.
- c. Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance) secara intensif (termasuk melakukan bimtek dan sosialisasi terkait perizinan pangan olahan, kosmetik dan OTSK) sesuai jadwal untuk target sarana produksi OT dan Pangan akan dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2023, sedangkan untuk sarana kosmetik telah dilakukan pada bulan Maret 2023.
- d. Desk CAPA (corrective action preventive action) atas hasil pemeriksaan akan membantu pelaku usaha untuk lebih cepat memenuhi perbaikan yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

**Tabel 51. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pendampingan ke sarana sesuai		Akan dilakukan pendamping	

	jadwal yang ditetapkan		an ke sarana produksi	
2.	Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai cara produksi olahan yang baik	➤Telah dilakukan bimtek kepada pelaku usaha kosmetik pada Maret 2023	Akan dilakukan pelatihan/bimtek kepada pelaku usaha pangan dan pelaku usaha obat tradisional	April – Juni 2023
3.	Merekrut dan melatih tenaga fasilitator eksternal untuk mempercepat proses penerbitan layanan sertifikasi.		Rekrutmen dan pelatihan fasilitator eksternal	April – Mei 2023

### Sasaran Strategis 5

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh

Sasaran Strategis 5 dicapai dengan NPS 105,50% dengan kriteria memenuhi ekspektasi

#### Indikator Kinerja

#### 17. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

##### a. Perbandingan Target Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2023

Table 52. Perbandingan Target Triwulan 1 dan Realisasi Triwulan 1 Tingkat Efektivitas KIE di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target 2022 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	92	93.85	102.01	Memenuhi Ekspektasi/Efektif

Pengukuran dan monitoring hasil survei dilakukan secara mandiri oleh Balai Besar

**POM di Banda Aceh pada aplikasi <http://evaluasi.kie.pom.go.id>**

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

1. KIE melalui media cetak dan elektronik;
2. KIE langsung ke masyarakat; dan
3. KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
3. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE;
4. Minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Balai Besar POM di Banda Aceh dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisisioner dan *online survey*. Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung setiap triwulan untuk indikator Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh. Tingkat efektifitas KIE diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan. Adapun kategori hasil tingkat efektifitas KIE sebagai berikut:

<b>Skor Indeks</b> <b>100</b>	<b>Interpretasi</b> <b>Efektifitas</b>
< 65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Capaian Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan tahun 2023 sudah mencapai target yaitu 102.01 % dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

**b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2023**

*Tabel 53 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Triwulan 1 Tingkat Efektifitas KIE di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh*

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.00	93.85	102.01	<b>Memenuhi Ekspektasi/Efektif</b>

Realisasi indeks Effektifitas KIE pada triwulan I adalah 93,85 dan jika iinterpretasi masuk dalam kategori “Efektif”.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Keberhasilan dalam capaian nilai Indeks Efektifitas KIE dikarenakan tema yang diangkat merupakan hal yang sangat ingin diketahui masyarakat serta keragaman materi yang disampaikan mampu menarik minat dari masyarakat. Balai Besar POM di Banda Aceh terus bekerja keras untuk menjangkau masarakat dengan berbagai media informasi dan komunikasi agar lebih dekat dengan masyarakat.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan Keberhasilan pencapaian kinerja ‘Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif’ disebabkan oleh:

1. Adanya KIE KORPORASI (Korlaborasi Koordinasi Pengurusan sertifikasi dan Ijin Edar Produk Obat dan Makanan) yang merupakan bentuk inovasi dari KIE berupa jemput bola dengan sasaran UMK yang ingin memperoleh sertifikasi dan ijin edar produk Obat dan Makanan
2. Adanya Inovasi JANET (Jawab Netizen) yang merupakan Inovasi dalam

menjawab pertanyaan yang masuk ke media sosial Balai Besar POM di Banda Aceh kemudian di jawab berupa video offline maupun secara online.

3. Adanya pelaksanaan Program kegiatan KIE Obat dan Makanan berupa:
    - a. Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelapa Narkotika (P4GN).
    - b. Talkshow di RRI Takengon FM 93,0 dengan Tema Intervensi Keamanan Pangan melalui Program Prioritas Nasional.
    - c. Advokasi Terpadu Keamanann Pangan Program Pro PN di Kabupaten/Kota Intervensi Balai Besar POM di Banda Aceh dalam rangka memperingati hari Gizi.
    - d. Dialog Interaktif di RRI Banda Aceh Pro 1 FM 97,7 dengan tema Keamnan Pangan Jajanan Anak Sekolah.
    - e. Sosialisasi SAKA POM terhadap 3 Krida yaitu KIE, Pemantauan dan Pengujian.
    - f. Dialog Interaktif di RRI Banda Aceh Pro 1 FM 97,7 dengan tema Memaksimalkan Pengawasan Panganan Berbuka di Ramdhan 1444 H
    - g. KIE kepada para pedagang takjil Ramadhan dan masyarakat di Banda Aceh, Aceh Besar, Bireuen dan Kota Lhokseumawe melibatkan anggota SAKA POM.
  4. Adanya layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui whatsapp, SMS, telepon maupun media sosial sehingga memperluas jaringan informasi ke masyarakat.
  5. Adanya penyebaran informasi KIE melalui media cetak dan media sosial berupa infografis maupun video edukasi.
- e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melibatkan peran SAKA POM pada kegiatan KIE di area keramaian dan sarana ritel/warung	On proses	Pembentukan SAKA POM di tiap Kab/Kota	Sampai dengan Desember 2023

## 18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

### a. Perbandingan Target Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2023

*Tabel 54. Perbandingan Target Triwulan 1 dan Realisasi Triwulan 1 Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh*

Indikator Kinerja	Target Triwulan 1	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	25	25	100	<b>Memenuhi Ekspektasi/Efektif</b>

Program PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

Tahapan Intervensi Keamanan PJAS yang dilakukan berupa Sosialisasi Keamanann Pangan untuk siswa dan guru, Bimbingan teknis keamanan pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, Pemberian paket edukasi berupa produk informasi keamanan pangan, Monitoring pemberdayaan Kader Keamanan Pangan, sampling dan pengujian sampel PJAS di kantin sekolah dan lingkungan sekitar sekolah serta pembinaan terhadap petugas kantin dan pedagang disekitar sekolah, tahapan selanjutnta adalah Sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman, serta tahapan Pengawasan Sekolah tahun sebelumnya.

Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya dikantin sekolah.

Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:

1. Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif,
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah,
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Realisasi dan capaian untuk indikator jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh bulanan dan triwulan dihitung dengan presentase progress, dikarenakan penetapan target belum ditetapkan secara resmi oleh pusat sehingga persentase target diambil dari rata rata untuk tiap triwulan sebesar 25% dari semua tahapan program sekolah yang telah dilaksanakan.

Adapun tahapan, persentase progress, realisasi dan % capaian tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 55. Bobot Progres Tahapan Program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah**

Tahapan	Bobot Progres	Jadwal pelaksanaan sesuai KAK	Realisasi TW1 2023	% Capaian
Advokasi lintas sektor	20 %	Jan - April	100 %	20 %
Sosialisasi Keamanan Pangan	10 %	Maret - April	100 %	5 %
Bimbingan Teknis kader Keamanan Pangan Sekolah	15 %	April - Juni	100 %	-
Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan	10 %	April - Nov	100 %	-
Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah PJAS	15 %	Juni - Sept	100 %	-
Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20 %	Agust - Nov	100 %	-
Pengawasan	10 %	Okt - Des	100 %	-
<b>Total Skor</b>	<b>100 %</b>			<b>25%</b>

**b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100%	25%	25	<b>Tidak memenuhi ekspektasi</b>

Realisasi dan capaian perbandingan target tahunan dan realisasi triwulan I Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tidak dapat dibandingkan karena realisasi untuk program sekolah berdasarkan persentase target bersifat kumulatif hingga akhir tahun 2023.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Program Pengawasan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2023

akan dilaksanakan di 4 Kabupaten/Kota intervensi berdasarkan usulan dari pemerintah daerah, diantaranya: Kota Langsa, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Bener Meriah. Target tahun 2023 adalah 72 Sekolah yaitu 16 Sekolah intervensi tahun 2023 dan 56 sekolah pengawalan yang diintervensi tahun 2020, 2021 dan 2022. Untuk sekolah perluasan sebanyak 65 sekolah.

Dari 4 kabupaten/kota intervensi dengan target berjumlah 16 (enam belas) sekolah terdiri dari sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA /SMK/MA di tahun 2023. Pemilihan sekolah berdasarkan usulan sekolah dari pemerintah daerah setempat saat pelaksanaan advokasi lintas sektor yang kemudian diseleksi kembali oleh petugas, sehingga didapat 4 (empat) sekolah intervensi A untuk tiap kabupaten/kota pada tahun 2023.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. Balai Besar POM di Banda Aceh akan melakukan intervensi keamanan pangan kepada sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya.

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi dengan pemerintah daerah selanjutnya mensurvey sekolah yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Tahapan progress program PJAS adalah Advokasi terpadu keamanan pangan kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Pangan, Kementerian Agama, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada saat advokasi ditentukan lokus sekolah yang akan diintervensi keamanan pangannya.

Tahapan selanjutnya adalah Sosialisasi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah tingkat SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dengan target 4 Kabupaten/kota intervensi

yaitu Langsa, Aceh Besar, Bireuen dan Bener Meriah, sedangkan 2 kabupaten/kota perluasan yaitu Aceh Tengah dan Aceh Jaya. Dengan jumlah target sekolah yaitu sebanyak 16 sekolah kategori intervensi A dan sebanyak 65 sekolah perluasan. Pada TW I ini telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi keamanan pangan kepada 35 sekolah kategori intervensi A dan sekolah perluasan di Kota Langsa dan Kab. Aceh Besar. Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini adalah kepala sekolah/guru dan siswa.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor BPOM Aceh dengan Pemerintah Daerah	Selesai (telah dilakukan Audiensi dan Advokasi Keamanan Pangan)		TW 1
2	Menggalang Komitmen Pemda dalam Program PN	Selesai (telah dilakukan Penandatanganan komitmen Bersama)		TW 1
3	Replikasi Program PN	On Proses	Replikasi Program Pro Pn oleh pemda	Akhir tahun

19. Jumlah desa pangan aman

a. Perbandingan Target Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2023

*Tabel 56 . Perbandingan Target Triwulan 1 dan Realisasi Triwulan 1 Jumlah Desa Pangan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh*

Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah desa dengan pangan aman	20%	25%	125	Tidak dapat disimpulkan

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi kewanaman pangan (desa baru) berupa Advokasi Kelembagaan Desa, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), Bimtek Komunitas, Fasilitas Keamanan Pangan, Intensifikasi Pengawasan

Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor), Lomba Desa Pangan Aman dan pengawalan desa sebelumnya. Kegiatan intervensi desa dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan intervensi pada pasar dan sekolah.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM  $> 0,707$  dan  $\leq 0.815$  dan desa berkembang adalah desa dengan IDM  $> 0.599$  dan  $\leq 0.707$ , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

1. Kader keamanan pangan desa yang aktif.
2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa.
3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrase dengan program lain).

Realisasi dan capaian untuk indikator jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tidak dihitung sebagai jumlah desa tetapi berdasarkan progress tahapan program. Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 program intervensi Desa Pangan aman di 6 (enam) desa intervensi pada 4 kabupaten/kota. Penetapan target belum ditetapkan secara resmi oleh pusat sehingga persentase target diambil dari rata rata untuk tiap triwulan sebesar 20% dari semua tahapan program desa yang telah dilaksanakan. Realisasi TW 1 yaitu 25 %. Dengan kategori "tidak dapat disimpulkan". Secara progress tahapan program capaian 25 % ini memenuhi ketentuan, Progress program yang telah dilaksanakan sesuai tahapannya dengan target yang ditetapkan oleh Direktorat PMPU. Tahapan program pengadaan gimmick, rapid test kit telah diajukan pengadaannya dan terealisasi di TW I.

Adapun tahapan, persentase progress, realisasi dan % capaian tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahapan	Bobot Progres	Jadwal pelaksanaan sesuai KAK	Realisasi 2022	% Capaian
Advokasi kelembagaan desa	20 %	Jan - April	100 %	20 %
Pengadaan gimmick, rapid test	5 %	TW 1- TW2	100 %	5 %
Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15 %	April - Juni	100 %	-
Bimtek Komunitas Desa	15 %	Mei - Okt	100 %	-
Fasilitasi Keamanan Pangan Desa	10 %	Juni - Nov	100 %	-
Intensifikasi Keamanan Pangan	10 %	Nov	100 %	-
Monev	10 %	Nov- Des	100 %	-
Lomba Desa Pangan Aman	5 %	Des	100 %	-
Pengawasan	10 %	Juni-Des	100 %	-
<b>Total Skor</b>	<b>100 %</b>			<b>20%</b>

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan 1	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Desa Pangan Aman	100%	25%	25	<b>Tidak memenuhi ekspektasi</b>

Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Triwulan I Jumlah Desa Pangan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tidak memenuhi ekspektasi dan belum dapat dibandingkan karena output program desa bukan jumlah desa per TW tapi progress tahapan program yang telah dilaksanakan. Target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga belum dapat dibandingkan karena baru dapat tercapai di akhir tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

### kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2023 akan dilaksanakan di 4 Kabupaten/Kota di Aceh. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini menargetkan 6 desa yang tersebar di 4 Kabupaten/Kota intervensi berdasarkan usulan dari pemerintah daerah, diantaranya:

- Kota Langsa yaitu desa matang seulimeng
- Kabupaten Aceh Besar yaitu desa Nusa dan desa Lubuk sukun
- Kabupaten Bireuen yaitu desa Jangka Alue
- Kabupaten Bener Meriah yaitu desa hakim tunggul naru dan desa gegerung

Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. Balai Besar POM di Banda Aceh akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll.

#### d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi yang selanjutnya dilakukan tahapan program Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi ditentukan lokus desa yang telah

didahului dengan survey desa pada saat audiensi yang dilakukan bersamaan dengan survey pasar dan sekolah. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Desa.

Pada kegiatan Advokasi telah dilakukan Penandatanganan komitmen Bersama Balai Besar POM di Banda Aceh dengan Pemerintah Daerah yang dintervensi Keamanan Pangan nya. Pada triwulan I ini juga telah dilakukan tahapan progress program Desa yaitu pengadaan gimmick dan rapid tes Kit, secara progress tahapan masih memenuhi ketentuan target yang telah ditetapkan oleh Direktorat PMPU.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor BPOM Aceh dengan Pemerintah Daerah	Selesai (telah dilakukan Audiensi dan Advokasi Keamanan Pangan)		TW 1
2	Menggalang Komitmen Pemda dalam Program PN	Selesai (telah dilakukan Penandatanganan komitmen Bersama)		TW 1
3	Replikasi Program PN	On Proses	Replikasi Program Pro Pn oleh pemda	Akhir tahun

20. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

a. Perbandingan Target Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2023

*Tabel 57. Perbandingan Target Triwulan 1 dan Realisasi Triwulan 1 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh*

Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	15%	40%	266.67%	Tidak dapat disimpulkan

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar

percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply dan demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Realisasi dan capaian tahapan program jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh sesuai target tahun 2022 mencapai target yang telah ditetapkan. Ada 5 pasar intervensi yang telah ditarget pada 4 kabupaten / kota lokus intervensi, yang dilaksanakan secara terpadu di kabupaten / kota yang sama. Pelaksanaan secara terpadu dalam kabupaten / kota yang sama berdampak positif terhadap pencapaian kabupaten / kota intervensi.

Adanya dukungan dan komitmen dari pihak terkait sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Adapun tahapan, persentase progress, Realisasi dan % capaian untuk tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahapan	Bobot Progres	Jadwal pelaksanaan sesuai KAK	Realisasi 2022	% Capaian
Advokasi lintas sektor	20 %	Februari- April	100 %	20 %
Survey Pasar	5 %	Januari - April	100 %	5 %
Bimbingan Teknis Petugas Pasar + Materi Pelatihan Fasilitator	15 %	April - Mei	100 %	15 %
Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1	15 %	April - Mei	100 %	-
Penyuluhan	10 %	Juni – Juli	100 %	-
Kampanye	10 %	Juni – Juli	100 %	-
Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap II	15 %	Sept - Okt	100 %	-
Pengawasan	10 %	Feb - Okt	100 %	-
<b>Total Skor</b>	100 %			<b>40%</b>

#### b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2023

*Tabel 58. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Triwulan 1 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh*

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Pasar Pangan Aman	100%	40	40	<b>Tidak memenuhi ekspektasi</b>

Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Triwulan I Jumlah Pasar Pangan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tidak memenuhi ekspektasi dan belum dapat dibandingkan karena output program desa bukan jumlah desa per TW tapi progress tahapan program yang telah dilaksanakan. Target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga belum dapat dibandingkan karena baru dapat tercapai

di akhir tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2023 akan dilaksanakan di 4 Kabupaten/Kota di Aceh. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 5 pasar yang tersebar di 4 Kabupaten/Kota intervensi diantaranya:

- Kota Langsa yaitu pasar induk.
- Kabupaten Aceh Besar yaitu pasar lambaro dan pasar keutapang dua.
- Kabupaten Bireuen yaitu pasar ganda pura.
- Kabupaten Bener Meriah yaitu pasar simpang tiga redelong.

Capaian yang melebihi target ini tercapai karena tahapan kegiatan advokasi dilaksanakan secara terpadu yang dilaksanakan di kabupaten kota intervensi, kemudian untuk survei dilaksanakan secara simultan dengan beberapa kegiatan lainnya untuk menghemat waktu, SDM dan anggaran. Untuk tahapan kegiatan Bimtek Petugas Pasar + Materi Pelatihan Fasilitator dilaksanakan secara terpadu pada satu waktu di Kota Banda Aceh disebabkan karena target pelaksanaan sampling dan pengujian tahap 1 yang akan dilakukan oleh petugas pasar adalah di bulan April dan Mei juga, sehingga untuk melatih petugas pasar yang terlatih/kompeten pelaksanaan bimtek dimajukan lebih awal. Dikhawatirkan akan ada keterlambatan pada progress kegiatan ke depan, hingga segera dilaksanakan pada TW 1. Jadi capaian lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas

yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan I telah dilaksanakan tahapan Program PPABK yaitu dilakukan Audiensi dengan pemerintah daerah kab/kota intervensi untuk pembahasan lokus pasar pengenalan program PN Keamanan Pangan, selanjutnya dilakukan tahapan Survey Pasar dan Pelaksanaan Advokasi Keamanan Pangan Terpadu dengan program Desa Pasar dan Sekolah di masing-masing Kabupaten/ Kota intervensi tahun 2023. Serta telah dilaksanakan juga tahapan program Bimtek Petugas Pasar + Materi Pelatihan Fasilitator.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor BPOM Aceh dengan Pemerintah Daerah	Selesai (telah dilakukan Audiensi dan Advokasi Keamanan Pangan)		TW 1
2	Menggalang Komitmen Pemda dalam Program PN	Selesai (telah dilakukan Penandatanganan komitmen Bersama)		TW 1
3	Replikasi Program PN	On Proses	Replikasi Program Pro Pn oleh pemda	Akhir tahun

**Sasaran Strategis 6**

**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh**

Sasaran Strategis 6 dicapai dengan NPS 115,37% dengan kriteria memenuhi ekspektasi

**Indikator Kinerja**

**21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I

Tabel 59. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I

Indikator Kinerja	Target TW I 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	37.64%	150.55%	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar =

$$(A + B) / 2$$

A = (Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

B = (Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar oleh BBPOM di Banda Aceh sebanyak 253 sampel dari total target 1310. Sampel yang diuji sesuai standar yang berasal dari BBPOM di Banda Aceh, Loka POM di Kab Aceh Tengah dan Loka POM di Kab Aceh Selatan dan sampel Regional dari BBPOM/BPOM/Loka lainnya di Lingkup regional

Padang telah diuji sebanyak 291 sampel dari total sampel yang masuk laboratorium sebanyak 520 sampel. Realisasi Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 150.55% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

**b. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	37.64%	37.64%	<b>Tidak memenuhi Ekspektasi</b>

Capaian BBPOM di Banda Aceh tidak memenuhi ekspektasi jika realisasi TW I dibandingkan terhadap target tahun 2023.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Capaian indikator kinerja sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tidak dapat disimpulkan karena oleh Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pedoman sampling, pedoman regionalisasi dan memenuhi timeline yang ditetapkan. Jumlah sampel yang masuk ke laboratorium lebih banyak daripada jumlah sampel yang disampling balai.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Untuk memenuhi target capaian kinerja sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Banda Aceh sudah melakukan kegiatan bertujuan mencegah dan mengatasi kendala terkait indikator kinerja ini. Kegiatan yang sudah dilakukan antara lain:

1. Mengadakan rapat internal dengan ketua tim dan anggota tim pemeriksaan dan pengujian terkait kendala laboratorium dan sampling produk Obat.
2. Memfasilitasi tim pengujian untuk meningkatkan kompetensinya terkait

pengujian Obat.

3. Membuka komunikasi dengan balai-balai regional terkait masalah laboratorium seperti ketersediaan reagen, suku cadang, peralatan, SIPT dan masalah teknis lain terkait pengujian.
  4. Komunikasi yang baik antara tim penguji dengan tim inspeksi di BBPOM di Banda Aceh maupun balai regional lain terkait sampling dan kemampuan uji laboratorium sehingga dapat dipastikan sampel yang masuk ke BBPOM di Banda Aceh dapat diuji.
- e. Upaya Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). Matriks tindak lanjut.

Capaian kinerja indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tidak dapat disimpulkan karena jumlah sampel yang masuk ke laboratorium lebih banyak dibandingkan sampel. Upaya yang dapat dilakukan adalah menyesuaikan jumlah target sampel yang masuk ke laboratorium sehingga capaian menjadi sesuai.

## 22. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I

Table 60. Target dan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target TW I 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	27	21.65	80.19	Belum memenuhi ekspektasi/Kurang efektif

Realisasi Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar =  
 $(A+B)/2$

**A = Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar/Jumlah target sampel Makanan  $\times 100\%$**

**B = Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar/Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium  $\times 100\%$**

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling

meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Sampel makanan yang diperiksa sesuai standar oleh BBPOM di Banda Aceh sebanyak 97 sampel dari target 448 sampel. Sampel yang masuk ke Laboratorium sebanyak 448 sampel yang berasal dari BBPOM di Banda Aceh, Loka POM Aceh Tengah, Loka POM Aceh Selatan dan sampel dari BBPOM/BPOM/Loka lain yang berada di wilayah regional. Dari 448 sampel, sebanyak 97 yang dapat diuji sesuai timeline pengujian yang disepakati yaitu 30 hari dengan memperhatikan clock off dan clock off akibat ketidaktersediaan reagen, kerusakan alat dan masalah teknis lainnya. Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 21.65%, capaian 80.19% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi/kurang efektif**.

**b. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	21.65	21.65	<b>Tidak memenuhi ekspektasi/Tidak efektif</b>

Pada tahun 2023 target indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 100% dengan realisasi 21.65%. Capaian kinerja 21.65% terhadap target setahun.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan**

kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Rendahnya capaian indikator kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar disebabkan karena sampel masuk ke laboratorium dua kali sebulan yaitu di minggu pertama dan ketiga sehingga timeline sampel berbeda. Hasil uji untuk sampel yang masuk di minggu ketiga akan dilaporkan bulan berikutnya. Sampel Januari masuk tanggal 24 Januari mengakibatkan realisasi kinerja di bulan Januari tidak ada.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tidak memenuhi ekspektasi karena time line pengujian untuk sampel yang masuk ke laboratorium di minggu ketiga jatuh pada bulan berikutnya, timeline pengujian terpenuhi tapi bukan kinerja di TW di mana sampel masuk ke laboratorium, karena masih dalam proses uji. Pada akhirnya realisasi akan sesuai dengan target tahunan yaitu 100%.

**Sasaran Strategis 7**

**Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh**

**Sasaran Strategis 7 dicapai dengan NPS 30% dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi**

**Indikator Kinerja**

**23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2023

**Tabel 61. Target dan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	27 %	8,10%	30 %	Tidak memenuhi Ekspektasi

Pada triwulan pertama, persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh, diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

- a. SPDP sebesar 15 % - nilai A [(a + b + c + d)/jumlah perkara]
- b. Tahap I sebesar 40 % - nilai B [(b + c + d)/jumlah perkara]
- c. P21 sebesar 30 % - nilai C [(c + d)/jumlah perkara]
- d. Tahap 2 sebesar 15 % - nilai D [(d)/jumlah perkara]

Nilai tingkat keberhasilan = [(15% x A) + (40% x B) + (30 % x C) + (15% x D) ] x (jumlah capaian/target perkara)

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun *n* dan perkara *carry over*. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain: a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara *pro justitia* berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara

yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

**Tabel 62. Perhitungan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Triwulan I tahun 2023 BBPOM di Banda Aceh**

Tahapan	Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi
	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over				
SPDP	1		1,00		0,15	15,00%
Tahap I		1	0,00	0,50	0,4	13,33%
P21			0,00	0,00	0,3	0,00%
Tahap II			0,00	0,00	0,15	0,00%
Realisasi Tahun Berjalan	1					28,33%
Realisasi Carry Over		1				

Uraian	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over	Total Realisasi Perkara	Total Target	Capaian Perkara	Nilai Kinerja
Realisasi Perkara	1	1	2	7	28,57%	8,10%
Target Perkara	6					

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini untuk adalah sebesar 80,00%. Realisasi yang diperoleh hingga Triwulan I adalah 8,1 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas dibandingkan terhadap target tahunan adalah sebesar 10,13 % dengan kriteria TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI.

**b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target triwulan I tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80,00%	8,1%	10,13%	Tidak memenuhi ekspektasi

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini untuk adalah sebesar 80,00%. Realisasi yang diperoleh hingga Triwulan I adalah 8,1 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas dibandingkan terhadap target tahunan adalah sebesar 10,13 % dengan kriteria TIDAK MEMENUHI EKSPETASI

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penyebab dari rendahnya pencapaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan pada TW I tahun 2023 karena berkas perkara belum terselesaikan, sehingga belum bisa dilaksanakan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (tahap I). Keterlambatan penyelesaian berkas perkara ini, disebabkan karena adanya kegiatan beberapa kali operasi intelijen yang merupakan kegiatan pra penindakan, sehingga perkara yang didapatkan sudah masuk pada akhir Februari 2023, setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan Operasi Tematik 2023 yang berlangsung selama sebulan, yaitu dari tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 20 April 2023. Namun berkas perkara tersebut direncanakan diselesaikan dan diserahkan ke Kejaksaan pada minggu kedua bulan April 2023.

Selain itu, adanya *carry over* perkara yang masih proses tahap I sejak Juni 2022, dan belum mendapat kejelasan dari Jaksa Penuntut Umum terkait status perkara tersebut juga menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi di TW I tahun 2023.

- d. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

### pencapaian pernyataan kinerja.

Pada TW I tahun 2023, BBPOM di Banda Aceh telah mendapatkan 1 perkara yang diproses hukum dari target 1 perkara yang ditetapkan pada Rencana Kinerja pada triwulan I. Satu perkara tersebut, adalah perkara mengenai produksi kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan yang dilarang, yaitu merkuri, hidroquinon dan asam retinoat. Keberhasilan memperoleh 1 perkara tersebut, tidak lepas dari pemantauan secara rutin sosial media milik pelaku yang akan dijadikan target operasi. Selain itu kegiatan/operasi intelijen di lapangan, juga berhasil menemukan 3 lokasi yang dijadikan tempat penyimpanan barang bukti.

### e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pembinaan kepada sarana online shop yang berpotensi menjadi target operasi penindakan dalam bentuk kegiatan pengawasan		Kegiatan dalam bentuk pengawasan	April s/d September 2023
2.	Penyelesaian perkara <i>carry over</i>		Pembuatan surat permintaan status perkara ke Kejaksaan Tinggi	30 Mei 2023

## Sasaran Strategis 8

Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal

Sasaran Strategis 8 tidak dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja di Triwulan I  
Indikator Kinerja

### 24. Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh

#### a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I

Tabel 63. Target dan Realisasi triwulan I Indeks RB BBPOM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh	-	-	-	-

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat Utama selaku Penanggung Jawab Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada

komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: Manajemen Perubahan: bobot 5%; Penataan Tatalaksana: bobot 5%; Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 15%; Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%; Penguatan Pengawasan: bobot 15%; Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%; Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%; Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

Pada triwulan I tahun 2023, belum diperoleh nilai indeks RB dari TPI (Tim Penilai Internal) atau APIP.

**b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2023**

*Tabel 64. Perbandingan Realisasi Indeks RB BBPOM di Banda Aceh dengan target tahun 2023*

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Realisasi TW I (%)</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Kriteria</b>
Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh	81.2	-	-	-

Belum ada nilai Indeks RB BBPOM di Banda Aceh pada triwulan I tahun 2023.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada tahun 2022, Balai Besar POM di Banda Aceh belum berhasil meraih predikat WBK, namun BBPOM Banda Aceh tetap melakukan perbaikan berkelanjutan untuk bisa meraih predikat WBK pada tahun 2023. Pada triwulan I Bulan Maret dilakukan pengisian data dukung pada LKE ZI dan belum dilakukan penilaian oleh TPI. BBPOM Banda Aceh tetap melakukan pengembangan pada inovasi-inovasi yang telah diciptakan dan juga menginformasikan setiap kegiatan yang dilakukan melalui media sosial ataupun aktivitas interaktif lainnya.

- d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	-	-	-	-

## 25. Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh

- a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I

*Tabel 65. Target dan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh triwulan I*

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	-	-	-	

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BBPOM di Banda Aceh adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh dengan rentang nilai sebagai berikut:

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan

pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian pada tabel di bawah ini.

*Tabel 66. Bobot Penilaian SAKIP*

Komponen	PermenPAN RB No. 12 Tahun 2015	PerMenPAN RB No.88 Tahun 2021	BPOM
Perencanaan Kinerja	30	30	24
Pengukuran Kinerja	25	30	24
Pelaporan Kinerja	15	15	12
Evaluasi Internal	10	25	20
Capaian Kinerja	20	-	20

Sampai dengan triwulan I tahun 2023, Balai Besar POM di Banda Aceh belum ada realisasi Nilai AKIP dari APIP karena penilaian bersifat tahunan.

**b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	78.90	-	-	

Belum ada realisasi nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Banda Aceh sampai dengan triwulan I tahun 2023.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada tahun 2022, BBPOM di Banda Aceh telah berhasil menaikkan nilai AKIP menjadi 79,16 (BB) sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan nilai tersebut pada tahun

2023. Pada triwulan I tahun 2023 sudah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil audit SAKIP dan juga melengkapi money rencana aksi pada laporan evaluasi internal triwulan I.

Tahun	Nilai SAKIP	Keterangan
2015	68.18	Baik (B)
2016	69.13	Baik (B)
2017	70.72	Sangat Baik (BB)
2018	75.39	Sangat Baik (BB)
2019	75,91	Sangat Baik (BB)
2020	75,96	Sangat Baik (BB)
2021	79,16	Sangat Baik (BB)

d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Mengadakan pendampingan dalam penyusunan LAKIN Tahun 2022	Mengundang Tim SAKIP dari Balai Besar POM di Surabaya		
2.	Menindaklanjuti kelemahan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022	Melakukan perbaikan pada setiap komponen SAKIP		

### Sasaran Strategis 9

Terwujudnya SDM BBPOM di BandaAceh yang berkinerja optimal

Sasaran Strategis 9 tidak dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja di Triwulan.

Indikator Kinerja

26. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I

*Tabel 67. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh triwulan I*

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target TW I</b>	<b>Realisasi (%)</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Kriteria</b>
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh	-	-	-	-

*Indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh diperoleh dari hasil survey menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : kualifikasi memiliki bobot 25 % ; kompetensi memiliki bobot 40 % ; kinerja memiliki bobot 30 % ; dan disiplin memiliki bobot 5 %.*

- 1. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai.*
- 2. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan.*
- 3. Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS.*
- 4. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.*

*Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:*

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu-seratus) berkategori Sangat Tinggi;*
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;*
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu-delapan puluh) berkategori Sedang;*
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan*
- e. Nilai 0 - 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.*

Pada triwulan I tahun 2023 belum diperoleh nilai Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh.

**b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2023**

**Tabel 68. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh dengan target tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh	83.00	-	-	-

Belum diperoleh nilai Indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh pada triwulan I.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional maupun teknis dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Dimensi kompetensi telah meningkat melalui pengembangan kompetensi berupa pelatihan klasikal dan non klasikal yang diikuti oleh seluruh pegawai. Pada triwulan I sudah 42 pegawai yang memenuhi pengembangan kompetensi 20 JP dan 35 pegawai masih di bawah 20 JP sehingga persentase sampai dengan triwulan I sebesar 54.55%.

Dimensi disiplin juga telah memperoleh nilai maksimal (data menyusul) karena telah dilakukan upaya peningkatan disiplin pegawai dengan cara penerapan inovasi *Repost "Reward dan Punishment"*. Inovasi ini dilakukan setiap triwulan (pemberian sertifikat kepada 3 orang pegawai dengan jumlah kinerja terbaik) untuk memacu pegawai tersebut meningkatkan kinerjanya. Sedangkan pegawai yang mendapatkan punishment yaitu pegawai yang kedisiplinan rendah, diberikan punishment berupa menyiram tanaman di halaman kantor. Hal tersebut dilakukan dalam pemenuhan kedisiplinan pegawai agar lebih baik.

Untuk meningkatkan dan mempertahankan indeks profesionalitas ASN dilakukan pemantauan terhadap nilai yang dicapai atas 4 dimensi dan peningkatan kualifikasi pendidikan juga berpengaruh untuk memaksimalkan IP ASN BBPOM di Banda Aceh.

- d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan kompetensi pegawai	Sudah mengusulkan pegawai yang telah diangkat Jabatan Struktural untuk mengikuti Diklat sesuai jabatan	Mengusulkan pegawai yang telah diangkat Jabatan Fungsional untuk mengikuti Diklat sesuai jabatan	2023

### Sasaran Strategis 10

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Sasaran Strategis 10 tidak dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja di Triwulan I Indikator Kinerja

## 27. Indeks Pemenuhan Laboratorium Obat dan Makanan sesuai standar GLP

- a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2023

Tabel 69. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP hingga triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2023	REALISASI BULANAN 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan Januari 2022	-	-	-	-
Bulan Pebruari 2022	-	-	-	-
Bulan Maret 2022	-	-	-	-

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari nilai asesment Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab

pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Standar Ruang Lingkup > 65,
2. Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
3. Standar Alat Laboratorium > 70.

Terkait dengan implementasi Regionalisasi Laboratorium tahun 2023 dan pemenuhan kapasitas dan kemampuan Laboratorium, pada akhir Maret 2023 telah dilakukan Monitoring Pemenuhan SKL Triwulan I oleh PPPOMN, namun belum terdapat hasil penilaian terhadap capaian Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) BBPOM di Banda Aceh.

**b. Perbandingan Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2022**

*Tabel 70. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Balai Besar POM di Banda Aceh di Triwulan 1 dengan target tahunan*

Indikator Kinerja	Target tahunan (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84	-	-	-

Belum ada realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP hingga triwulan I tahun 2023 sehingga belum dapat dibandingkan dengan target tahun 2022.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada tahun 2023 terdapat perubahan tools penilaian SKL, hal ini disebabkan adanya Regionalisasi Laboratorium, sehingga standar yang digunakan untuk penilaian disesuaikan pula dengan penugasan yang diberikan terhadap

laboratorium tersebut. BBPOM di Banda Aceh senantiasa berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Usaha yang dilakukan pada triwulan I untuk mencapai target antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi personel laboratorium, dan Standar Alat Laboratorium.
- Melakukan pemenuhan Standar Ruang Lingkup dengan membuat perencanaan verifikasi metode dan perencanaan uji sampel untuk pemenuhan ruang lingkup
- Melakukan pemenuhan Standar kompetensi Personel dengan merencanakan pengembangan kompetensi.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Keterangan	Januari	Februari	Maret
<b>Kendala/ Permasalahan</b>	Petunjuk teknis regionalisasi laboratorium baru diterbitkan sehingga laboratorium baru mendapatkan kepastian parameter apa saja yang menjadi tugasnya dan baru dapat merencanakan pemenuhan SRL, kompetensi dan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan	Beberapa alat, suku cadang, reagen dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk regionalisasi laboratorium dan pemenuhan SRL belum tersedia, dan terlalu lama bila menunggu proses pengadaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beberapa alat laboratorium mengalami kerusakan sehingga harus dilakukan pengadaan untuk menggantikan alat yang Rusak</li> <li>• Beberapa reagensia habis dan menunggu waktu pemesanan lama</li> </ul>
<b>Rekomendasi/Perbaikan</b>	Dibuat perencanaan pemenuhan SRL, kompetensi dan peralatan	Mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan alat, suku cadang, reagen dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk regionalisasi laboratorium dan pemenuhan SRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan pengadaan untuk menggantikan alat yang rusak</li> <li>• Diupayakan melakukan peminjaman reagensia ke Balai Regional Padang melalui aplikasi Apresiasi</li> </ul>

<b>Rencana Aksi</b>	Membuat perencanaan pemenuhan SRL, kompetensi dan alat sesuai dengan kebutuhan regionalisasi	Dilakukan revisi anggaran untuk alokasi alat, suku cadang, reagen dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk regionalisasi laboratorium dan pemenuhan SRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan alat yang rusak direncanakan dengan mengoptimalkan anggaran sisa pengadaan alat</li> <li>• Komunikasi yang intensif antara Balai Region</li> </ul>
<b>Kondisi Sebelum Rencana Aksi</b>	Perencanaan pemenuhan SRL, kompetensi dan alat berdasarkan standar kemampuan laboratorium tahun 2021	Alat, suku cadang, reagen dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk regionalisasi laboratorium tidak dapat dipenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat yang rusak tidak dapat digunakan dan mengganggu proses pengujian</li> </ul>
<b>Kondisi Setelah Rencana Aksi</b>	Kondisi Februari  Perencanaan pemenuhan SRL, kompetensi dan alat telah disusun dengan mengakomodir Regionalisasi laboratorium	Kondisi Maret  Alat, suku cadang, reagen dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk regionalisasi laboratorium dapat dipenuhi	Kondisi April  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beberapa alat laboratorium yang rusak dalam proses pengadaan (tahap pemesanan)</li> </ul>

## 28. Indeks Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

### a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I

*Tabel 71. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal triwulan I*

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal	2.5	2.9	116.00	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Capaian nilai indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh 116.00% dengan kriteria memenuhi ekspektasi pada triwulan I. Hal ini karena adanya peningkatan pemanfaatan indikator data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh.

### b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2023

**Tabel 72. Perbandingan realisasi Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh triwulan I dengan target tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal	2.5	2.9	116.00	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh pada triwulan I tahun 2023 memenuhi ekspektasi. Hal ini karena dilakukannya sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pemanfaatan data dan informasi serta monitoring dan evaluasi secara berkala.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi indikator hingga triwulan I tahun 2023 dari Pusat Data dan Informasi dapat dilihat sebagai berikut:

Pemutakhiran SPIMKER	Pemutakhiran SIPT	Pemanfaatan Berita aktual	Pemanfaatan Sharing folder	Pemanfaatan Dashboard BOC	Pemanfaatan Email	Realisasi Indeks
0.4	2.4	3	3	3	3	2.9

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh pada triwulan I tahun 2023 sudah melebihi target yang ditetapkan, beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan nilai indeks antara lain:

- a. meningkatkan akses email oleh pegawai, dengan cara mentautkan “link absensi apel pusat” pada email setiap pegawai dan melakukan monev dalam penarikan data setiap bulan untuk pengecekan aktifasi email pegawai.
- b. Tetap rutin melakukan upload berita aktual oleh petugas balai dengan target yang ditetapkan.
- c. Meningkatkan akses sharing folder dalam waktu 1 bulan.

Nilai indeks pemutakhiran SPIMKER dan SIPT masih rendah karena masih terdapat beberapa kendala dalam aplikasi diantaranya:

- a. Penginputan data kasus keracunan yang dilakukan tidak tepat waktu.
  - b. Verifikasi data kasus keracunan yang diverifikasi tidak maksimal 30 hari kerja.
  - c. SIPT tidak dilakukan monitoring dan evaluasi, hal ini di perlukan agar proses kerja sistem tersebut lebih maksimal.
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja
- Balai Besar POM di Banda Aceh akan terus meningkatkan indeks pengelolaan data dan informasi pada setiap bidang/sub bidang dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sistem informasi secara berkala.
- e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Matriks Tindak Lanjut

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sistem informasi	Pemutakhiran data dan informasi pada BOC, SIPT sudah dilakukan secara berkala dan akan terus dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya	Pemutakhiran data dan informasi pada SPIMKER secara berkala	

**Sasaran Strategis 11**

**Terkelolanya Keuangan BBPOM diBanda Aceh secara Akuntabel  
Indikator Kinerja**

Sasaran Strategis 11 dicapai dengan NPS 97,85% dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

## Indikator Kinerja

### 29. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh

#### a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I

Tabel 73. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	50.0	69.37	138.73	Tidak dapat disimpulkan

Nilai Kinerja Anggaran triwulan I tahun 2023 sudah melebihi target triwulan I. Realisasi berasal dari nilai EKA sebesar 50.57 pada Monev DJA dan Nilai IKPA 97.57 dengan perhitungan  $(50.57 \times 60\%) + (97.57 \times 40\%)$ .

#### Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L terdapat 8 indikator kinerja, meliputi Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan penyampaian capaian output.

#### Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L, Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

#### b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2023

*Tabel 74 Perbandingan Realisasi triwulan I NKA BBPOM di Banda Aceh dengan target tahun 2023*

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	92.1	69.37	75.32	<b>Tidak memenuhi ekspektasi</b>

Nilai kinerja anggaran pada triwulan I tahun 2023 belum mencapai target, sehingga diperlukan perbaikan agar mencapai target pada akhir tahun 2023.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pencapaian nilai NKA TW I melebihi target yang ditetapkan, hal ini dipengaruhi oleh semakin tingginya tingkat pemahaman dan komitmen bersama dalam pengelolaan kinerja dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi berkala yang dilakukan sehingga pada TW I ini hampir semua penilaian komponen pada IKPA mencapai nilai 100 hanya pada RPD Hal III DIPA saja hasil yang didapatkan belum maksimal.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Banda Aceh dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala  
Monitoring dan evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran rutin dilaksanakan berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan pencairan anggaran melalui mekanisme GUP, LS dan TUP. Selama TW I 2023 ini, BBPOM di Banda Aceh melakukan 12 (dua belas) kali GUP dan mekanisme pembayaran langsung (LS) untuk perjalanan dinas.
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran  
Selama TW I 2023 BBPOM di Banda Aceh telah melakukan 2 (dua) kali penyesuaian kegiatan dan anggaran melalui mekanisme revisi DIPA dan 5 (lima) kali revisi POK. Realisasi anggaran TW I 2023 sebesar 22,58 persen.

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Percepatan proses pencairan kontrak agar sesuai dengan RPD Hal III DIPA yang telah direncanakan		Pada TW berikutnya lebih memperhatikan pencairan sesuai dengan rencana yang telah disusun	

### 3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran BBPOM di Banda Aceh bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2023 No. SP DIPA-063.01.2.432790/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 dengan anggaran awal sebesar Rp27.258.618.000,- (Dua puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan 31 Maret 2023 sebesar **Rp6.155.058.194,-** atau **22,58 persen**.

JENIS BELANJA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Pegawai	11.424.000.000	2.017.058.247	17.66
Belanja Barang	13.251.618.000	1.837.199.947	13.86
Belanja Modal	2.583.000.000	2.300.800.000	89.07
<b>Jumlah</b>	<b>27.258.618.000</b>	<b>6.155.058.194</b>	<b>22.58</b>

#### Pengukuran Efisiensi dan Efektifitas Kinerja

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan, maksudnya adalah mengukur kemampuan suatu kegiatan dengan menggunakan *input* yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar, atau persentase capaian *output* lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran):

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Nilai maksimum dari SE adalah 1, dan digunakan sebagai indeks efisiensi, dihitung menggunakan rumus:

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Untuk mengukur apakah suatu kegiatan dinyatakan efisien atau tidak efisien, digunakan formula logika sebagai berikut:

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika  $IE > SE$ , maka kegiatan dianggap efisien

Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien

Derajat efisiensi atau disebut Tingkat Efisiensi (TE) merupakan pernyataan seberapa jauh/tinggi tingkat efisiensi kegiatan yang dinyatakan tidak efisien. Rumus untuk menghitung tingkat efisiensi setiap kegiatan dihitung menggunakan persamaan:

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Efektivitas kegiatan adalah derajat/tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Untuk mengetahui derajat efektivitas perlu diketahui pencapaian

indikator *outcome*. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa waktu (dalam satuan tahun) setelahnya. Pengukuran tingkat efektivitas sifatnya masih berdasarkan angka, bukan realisasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

### Realisasi PNBPN TW I 2023 Balai Besar POM di Banda Aceh



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH

#### REKAP PNBPN KEMENTERIAN

Bulan : Maret

No	BA	NAMA KL	KODE ES1	NAMA ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	AKUN	NAMA AKUN	NILAI
1	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	06301	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	323,750
2	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	06301	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	4,400,000
3	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	06301	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	22,800,721
<b>GRAND TOTAL</b>									<b>27,524,471</b>

### 3.3 Pemanfaatan Laporan Kinerja

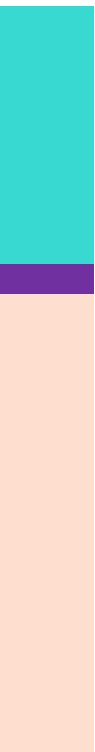
Laporan Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh menerapkan evaluasi Kinerja berbasis *balance score card* dengan menggunakan data kinerja yang dirangkumkan di dalam Laporan Kinerja. Rekomendasi diperoleh dari Laporan Kinerja Interim dan tahunan.

#### a. Pemanfaatan Laporan Kinerja Interim

Setiap triwulan dilaksanakan pengumpulan data kinerja dan dilakukan evaluasi yang kemudian dibukukan dalam laporan Kinerja Interim. Indikator Kinerja Utama (IKU) dikaji ulang pencapaiannya terhadap target dan bila dibutuhkan diberikan rekomendasi pencapaian di triwulan berikutnya. Diantaranya adalah tata kelola anggaran dengan melakukan Revisi Halaman III DIPA dan pemutakhiran data POK dilaksanakan sesuai jadwal dan Revisi DIPA/POK dilakukan tepat waktu.

#### e. Pemanfaatan Laporan Kinerja Tahunan

Beberapa Sasaran Strategis memiliki capaian yang belum memenuhi ekspektasi. Kendala yang dihadapi serta rekomendasi perbaikan untuk penyesuaian target di



tahun berikutnya diperoleh dengan melihat tren pencapaian sasaran menggunakan tools SWOT dan analisa tren dengan pembandingan yang setara. Data kinerja di Laporan Kinerja tahunan digunakan sebagai data primer yang valid penetapan target Sasaran Strategis di tahun berikutnya.

# BAB IV

## PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) total sebesar 102,81 dengan kriteria memenuhi ekspektasi berhasil dicapai di tahun 2022. Learning and Growth Perspective memiliki capaian tertinggi 104,36 disusul Internal process Perspective dengan capaian 104,32 dan NPS Perspektif tersebut telah mampu dicapai dengan kategori memenuhi ekspektasi. Namun hal tidak sama halnya dengan kriteria pada stakeholders Perspektif yang hanya bernilai 99,76 atau belum memenuhi ekspektasi.

- a. Kriteria stakeholders Perspective, Sasaran Strategis 2 dan 3 telah berhasil dicapai dengan kriteria memenuhi ekspektasi tetapi tidak halnya dengan Sasaran Strategis 1 yang belum memenuhi ekspektasi.
- b. Pada Kriteria Internal Process Perspective terdapat empat Sasaran Strategis di level ini dan tiga diantaranya telah memenuhi ekspektasi, kecuali pada Sasaran Strategis 6 yang belum memenuhi ekspektasi.
- c. Learning and Growth perspective NPS 104,36 Sasaran Strategis 8 hingga 10 telah dicapai dengan kriteria memenuhi ekspektasi, namun Sasaran Strategis 11 masih dibawah harapan dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi.
- d. Terdapat 19 (sembilan belas) IKU **memenuhi ekspektasi**, 7 (tujuh) IKU **belum memenuhi ekspektasi** dan 3 (tiga) IKU **tidak dapat disimpulkan**.
- e. 7 (tujuh) indikator kinerja Belum memenuhi ekspektasi, yaitu:
  - Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan capaian 90.31%.
  - Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan capaian 97.32%.
  - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan capaian 90.27%.
  - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan

capaian 86.14%.

- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan capaian 95.76%.
- Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan capaian 99.73%.
- Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh dengan capaian 92.09%.

f. Tiga Indikator Kinerja yang Tidak dapat disimpulkan, yaitu:

- Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan capaian sebesar 166.48%.
- Indeks Pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal dengan capaian 128.00%.
- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik dengan capaian 129,87%.

g. Balai Besar POM di Banda Aceh pada Triwulan 1 tahun 2023 telah merealisasikan DIPA tahun 2023 No. SP DIPA-063.01.2.432790/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 dengan anggaran awal sebesar Rp27.258.618.000,- (Dua puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan 31 Maret 2023 sebesar **Rp6.155.058.194,-** atau **22,58 persen**.

## 4.2 Saran

1. Melakukan perencanaan anggaran dengan tepat agar semua kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.
2. Menyusun langkah-langkah untuk Indikator Kinerja yang capaiannya masih belum memenuhi ekspektasi.
3. Mengadakan pelatihan kompetensi kepada pegawai yang mendukung kinerja kegiatan.



# LAMPIRAN





**PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2023**  
**BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH**

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	Kode RO	RINCIAN RO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Koordinasi	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Kegiatan	112,854,000 14	2,303,800 3	2.04 21.43	1,049.70	1	1.00	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pelayanan Publik Lainnya	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Dokumen	174,905,000 231	39,448,187 48	22.55 20.78	92.13	1	0.99	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan Standar oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : UMKM	52,594,000 14	300,000 1	0.00 0.00	0.00	1	0.00	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pemantauan Produk	3165.BKB.001	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana Output : Laporan	378,040,000 1	47,311,786 0.24	12.52 24.00	191.77	1	0.99	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Komunikasi Publik	3165.BMB.001	Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Jenis Layanan	127,867,000 32	18,284,000 11	14.30 34.38	240.40	1	1.00	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Sarana Bidang Kesehatan	3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Input : Dana Output : Paket	188,000,000 1	0 0.16	0.00 16.00	0.00	1	0.00	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3165.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Input : Dana Output : Unit	75,000,000 5	0 0.86	0.00 17.20	0.00	1	0.00	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3165.EBA.962	Layanan Umum	Input : Dana Output : Layanan	188,321,000 1	0 0.24	0.00 24.00	0.00	1	0.00	Efisien

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	Kode RO	RINCIAN RO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Standarisasi Lembaga	3165.PDD.001	Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Input : Dana Output : Lembaga	1,528,784,000 1	281,579,776 0.24	18.42 24.00	130.30	1	0.99	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Perkara Hukum Badan Usaha	3165.QCD.U12	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Banda Aceh	Input : Dana Output : Perkara	585,456,000 6	55,554,532 1	9.49 16.67	175.64	1	0.99	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Input : Dana Output : Lembaga	727,378,000 72	163,004,050 18	22.41 25.00	111.56	1	0.99	Efisien
			3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	Input : Dana Output : Lembaga	1,033,078,000 25	49,890,500 6	4.83 24.00	496.97	1	1.00	Efisien
			3165.QDB.003	Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Input : Dana Output : Lembaga	424,691,000 19	67,924,050 7	15.99 36.84	230.35	1	1.00	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BBPOM Banda Aceh	Input : Dana Output : Orang	233,077,000 1,010	9,100,000 235	3.90 23.27	595.94	1	1.00	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pengawasan dan Pengendalian Produk	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Produk	444,208,000 448	14,317,100 97	3.22 21.65	671.78	1	1.00	Efisien
			3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai Standar oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Produk	889,846,000 1,310	37,291,458 307	4.19 23.44	559.21	1	1.00	Efisien
			3165.QIA.008	Sampel Pangan Fortifikasi yang diperiksa oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Produk	48,603,000 75	48,603,000 55	100.00 73.33	73.33	1	0.99	Tidak Efisien

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	Kode RO	RINCIAN RO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh BB/BBPOM	Input : Dana Output : Lembaga	81,473,000 72	15,059,290 16	18.48 22.22	120.23	1	0.99	Tidak Efisien
			3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh BB/BBPOM	Input : Dana Output : Lembaga	1,673,748,000 896	107,026,086 272	6.39 30.36	474.75	1	1.00	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Sarana Bidang Kesehatan	3165.RAB.001	Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Input : Dana Output : Paket	2,320,000,000 1	2,300,800,000 1	99.17 100.00	100.83	1	1	Efisien
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (063.01.WA)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (6384)	Layanan Perkantoran	6384.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	Input : Dana Output : Bulan	11,424,000,000 12	2,017,058,247 3	17.66 25.00	141.59	1	0.99	Tidak Efisien
			6384.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Input : Dana Output : Bulan	4,546,695,000 12	916,437,532 3	20.16 25.00	124.03	1	0.99	Tidak Efisien



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BBPOM di Banda Aceh  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt.  
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh  
selanjutnya disebut Pihak Pertama  
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Banda Aceh, 22 Desember 2022  
Pihak Pertama

Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BBPOM di Banda Aceh

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	52
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93.4
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73.62
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	93
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,40
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	72
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	25
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	19
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	81.2
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	78.9
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	92.1
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79

Kegiatan :  
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :  
Rp.  
27,258,618,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Banda Aceh, 22 Desember 2022  
Pihak Pertama



Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt.



**cek✓KLIK**  
Kemasan - Label - Izin Edar - Kedaluwarsa

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

Alamat BPOM ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh  
No. 110 Telp : 0651-22845  
Fax : 0651-22735  
Banda Aceh 23126



 @bpomaceh

 BPOM Aceh

 BPOM Aceh

 @BPOMAceh

 0811 6853 301

 <https://aceh.pom.go.id/>